

**ANALISIS PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH  
PADA SEKTOR  
PENDIDIKAN, SEKTOR KESEHATAN DAN SEKTOR  
INFRASTRUKTUR  
TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DALAM  
PERSPEKTIF  
EKONOMI ISLAM (Studi Kasus Kabupaten Pringsewu 2010-  
2017)**

**Skripsi  
Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi  
Syarat-Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Ekonomi  
(S.E)  
dalam Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam**

**Oleh :**

**NURUL SEPTIANI**

**NPM. 1551010093**

**Jurusan : Ekonomi Syariah**



**ANALISIS PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH  
PADA SEKTOR PENDIDIKAN, SEKTOR KESEHATAN  
DAN SEKTOR INFRASTRUKTUR TERHADAP  
PERTUMBUHAN EKONOMI DALAM PERSPEKTIF  
EKONOMI ISLAM (Studi Kasus Kabupaten Pringsewu  
2010-2017)**

**Skripsi**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi  
Syarat-Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Ekonomi  
(S.E)**

**dalam Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam**

**Oleh :**

**NURUL SEPTIANI**

**NPM. 1551010093**

**Jurusan : Ekonomi Syariah**

**Pembimbing I : Vitria Susanti, M.A.,Mec,Dev**

**Pembimbing II : Femei Purnamasari, S.E.,M.Si**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1441 H / 2019 M**

## ABSTRAK

Pertumbuhan ekonomi menjadi indikator dalam melihat keberhasilan pembangunan dalam suatu daerah. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi yakni melalui realisasi pengeluaran pemerintah dari berbagai sektor seperti, pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan, sektor kesehatan dan sektor infrastruktur. Dimana pendidikan dan kesehatan berperan penting dalam meningkatkan modal manusia dan infrastruktur berperan penting dalam memperlancar arus perekonomian. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan, sektor kesehatan dan sektor infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten Pringsewu tahun 2010-2017? Dan bagaimana pertumbuhan ekonomi dalam perspektif islam? Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan, sektor kesehatan dan sektor infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten Pringsewu tahun 2010-2017 serta mengetahui pertumbuhan ekonomi dalam perspektif islam. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan data sekunder berupa *time series* yaitu tahun 2010-2017. Pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi yang bersumber pada Badan Pusat Statistik (BPS) dan Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan, data yang terkumpul dianalisis menggunakan regresi linear berganda dengan pengeluaran pemerintah sektor pendidikan (X1), sektor kesehatan (X2), sektor Infrastruktur (X3) dan pertumbuhan ekonomi (Y). Berdasarkan uji regresi linear berganda secara parsial diperoleh pada variabel pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan dan sektor kesehatan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dengan nilai Sig.  $0,422 > 0,05$  dan  $0,123 > 0,05$ . Variabel pengeluaran pemerintah pada sektor infrastruktur berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dengan nilai Sig.  $0,005 < 0,05$ . Sedangkan secara simultan menunjukkan bahwa variabel pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan, sektor kesehatan dan sektor infrastruktur berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dengan nilai Sig.  $0,003 < 0,05$ . Pandangan islam melihat bahawasannya pertumbuhan ekonomi tidak hanya mengejar kesejahteraan materi didunia saja, melainkan kesejahteraan diakhirat. Yang terpenting dari pertumbuhan ekonomi terletak pada pertumbuhan, pemerataan dan keadilan, sehingga tercipta kesejahteraan. Pendidikan dan kesehatan kabupaten Pringsewu masih jauh dari kata adil, dimana masih banyak anak yang belum mendapatkan pendidikan semaksimal mungkin, serta masih banyaknya masyarakat peringsewu yang belum menerima bantuan kesehatan dari pemerintah.

**Kata kunci : Pengeluaran Pemerintah, Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur dan Pertumbuhan Ekonomi**





**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat : Jl Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung (0721) 703260

**PERSETUJUAN**

Judul Skripsi : **ANALISIS PENGELUARAN PEMERINTAH SEKTOR  
PENDIDIKAN, SEKTOR KESEHATAN DAN SEKTOR  
INFRASTRUKTUR TERHADAP PERTUMBUAHAN  
EKONOMI DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM  
(Studi Kasus Kabupaten Pringsewu Tahun 2010-2017)**

Nama Mahasiswa : **Nurul Septiani**  
NPM : **1551010093**  
Program Studi : **Ekonomi Syari'ah**  
Fakultas : **Ekonomi dan Bisnis Islam**

**MENYETUJUI**

Untuk dimunaqasahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqasah Fakultas  
Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung.

**Pembimbing I**

**Vitria Susanti, M. A., M. Ec.Dev**

**NIP. 19780918200512005**

**Pembimbing II**

**Femei Purnamasari, S. E., M. Si.**

**NIP. 198405212015032004**

**Ketua Jurusan**

**Madnasir.S.E., M.Si**

**NIP.197504242002121001**





**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung (0721) 703260

**PENGESAHAN**

**Skripsi dengan judul ANALISIS PENGELUARAN PEMERINTAH SEKTOR  
PENDIDIKAN, SEKTOR KESEHATAN DAN SEKTOR INFRASTRUKTUR  
TERHADAP PERTUMBUAHAN EKONOMI DALAM PERSPEKTIF  
EKONOMI ISLAM (Studi Kasus Kabupaten Pringsewu Tahun 2010-2017)**

disusun oleh **Nurul Septiani, NPM: 1551010093**, Jurusan Ekonomi Syaria'ah,  
telah diujikan dalam sidang munaqasah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN  
Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal : **Rabu, 12 Februari 2020**.

**TIM MUNAQSAH**

Ketua Sidang : **Madnasir, S.E., M.Si**

Penguji 1 : **A. Zuliyansyah, S.Si., M.M**

Penguji 2 : **Femei Purnamasari S.E., M.Si**

Sekretaris : **M. Fikri Nugroho Khalid M.Pd**



**Dr. Ruslan Abdul Ghofur, S.Ag., M.Si**

**NIP. 198009012003121001**

## MOTTO

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا

مِنْ رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ ١٥

Artinya: “Dialah Yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezeki-Nya. Dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan”.

(Q.S Al-Mulk: 15)

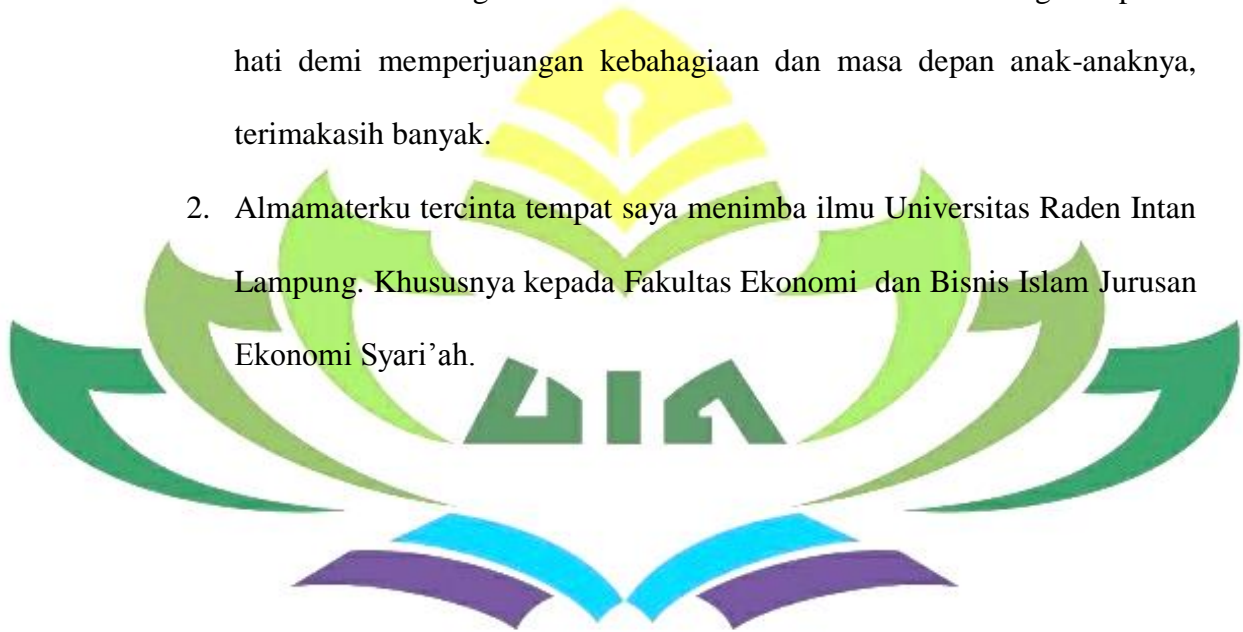




## **PERSEMBAHAN**

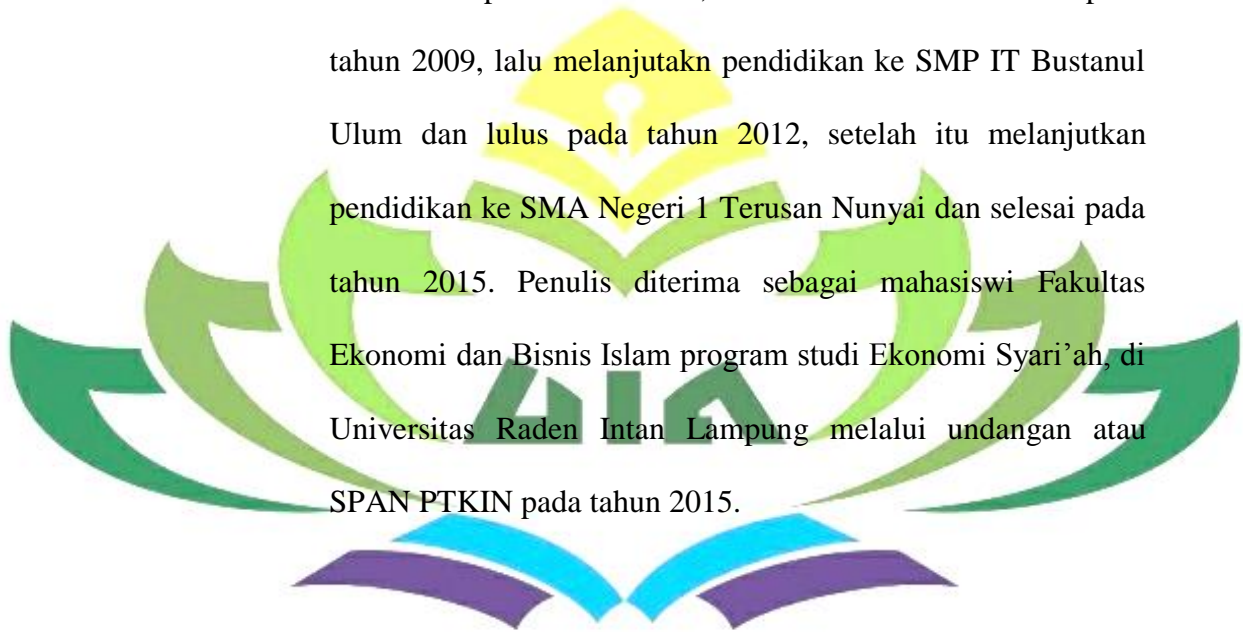
Dengan mengucap rasa Syukur kepada Allah SWT dan dari hati yang terdalam penulisan skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tuaku Bapak Mugiono dan Ibu Kasyanti yang sangat Nurul hormati dan cintai, yang telah merawatku, menguatkan dan memotivasiku dengan memberikan nasihat serta doa-doa dengan sepenuh hati demi memperjuangkan kebahagiaan dan masa depan anak-anaknya, terimakasih banyak.
2. Almamaterku tercinta tempat saya menimba ilmu Universitas Raden Intan Lampung. Khususnya kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Syari'ah.



## **RIWAYAT HIDUP**

Penulis bernama lengkap Nurul Septiani, dengan nama kecil Ulung. Dilahirkan di Yukum Jaya kabupaten Lampung Tengah pada tanggal 20 September 1997. Penulis merupakan anak kedua dari pasangan Bapak Mugiono dan Ibu Kasiyanti. Adapun riwayat pendidikan penulis yaitu TK IT Bustanul Ulum lulus pada tahun 2002, SD IT Bustanul Ulum lulus pada tahun 2009, lalu melanjutkan pendidikan ke SMP IT Bustanul Ulum dan lulus pada tahun 2012, setelah itu melanjutkan pendidikan ke SMA Negeri 1 Terusan Nunyai dan selesai pada tahun 2015. Penulis diterima sebagai mahasiswi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam program studi Ekonomi Syari'ah, di Universitas Raden Intan Lampung melalui undangan atau SPAN PTKIN pada tahun 2015.





## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya maka penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Pada Sektor Pendidikan, Sektor Kesehatan dan Sektor Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pringsewu dalam Perspektif Ekonomi Islam. Dalam rangka memnuhi syarat untuk memperoleh gelar sarjana ekonomi pada program studi Ekonomi Syari'ah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Raden Intan Lampung

Skripsi ini ditulis sebagai bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan studi pendidikan sarjana satu (S1) di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Raden Intan Lampung guna mendapat gelar Sarjana Ekonomi (SE). Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan krna keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang penulis miliki. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan trimakasih kepada:

1. Dr. Ruslan Abdul Ghofur, S.Ag.,M.Si selaku Dekan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Raden Intan Lampung yang senantiasa tanggap terhadap kesulitan Mahasiswa.

2. Madnasir, S.E., M.Si selaku ketua jurusan dan selaku sekretaris jurusan Ekonomi Syari'ah yang senantiasa sabar dalam memberikan arahan dan motivasi kepada penulis hingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.
3. Vitria Susanti, M.A.,Mec,Dev dan Femei Purnamasari, S.E.,M.Si yang merupakan pembimbing I dan Pembimbing II yang telah tulus meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan benar.
4. Seluruh dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan ilmu, pengalaman, pelajaran kepada penulis selama proses perkuliahan.
5. Seluruh staff akademik dan pegawai perpustakaan yang telah memberikan pelayanan yang baik dan memberikan informasi serta sumber referensi kepada penulis.
6. Kakak laki-lakiku Sigit Pramugi yang aku sayangi selalu memberikan suport dalam kuliahku.
7. Seluruh sahabat spesialku Endah, Renny, Solehah, Yunizar, Fadly, Dzaki dan Fitra, terimakasih atas rasa persaudaraan dan canda tawa yang kalian berikan selama ini.
8. Teman-teman seperjuangan kelas EI B angkatan 2015 yang telah bersama semasa perkuliahan.
9. Teman KKN Desa Sukajaya yang telah memberi semangat dalam meyelesaikan skripsi ini

Dengan segala kerendahan hati, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat dijadikan bahan referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya. Penulis menyadari banyak kelemahan sehingga kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak sangat penulis harapkan.

Bandar Lampung, 03 November 2019  
Penulis

**Nurul Septiani**  
**1551010093**





## DAFTAR ISI

### HALAMAN JUDUL

ABSTRAK.....	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
PENGESAHAN .....	v
MOTTO.....	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
RIWAYAT HIDUP .....	viii
KATA PENGANTAR .....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi

### BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul.....	1
B. Alasan Memilih Judul.....	3
C. Latar Belakang Masalah .....	4
D. Batasan Masalah.....	14
E. Rumusan Masalah.....	15
F. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	15

### BAB II LANDASAN TEORI

A. Pertumbuhan Ekonomi .....	17
1. Definisi Pertumbuhan Ekonomi.....	17
2. Faktor -faktor Pertumbuhan Ekonomi .....	19
3. Teori Pertumbuhan ekonomi.....	21
4. Pertumbuhan Ekonomi Dalam Perspektif Ekonomi Islam .....	24
B. Pengeluaran Pemerintah .....	29
1. Definisi Pengeluaran Pemerintah.....	29
2. Teori Pengeluaran Pemerintah.....	34
3. Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan .....	35

4. Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan .....	37
5. Pengeluaran Pemerintah Sektor Infrastruktur .....	38
C. Tinjauan Pustaka .....	39
D. Kerangka Pemikiran .....	43
E. Hipotesis .....	45

### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian .....	52
B. Sumber Data .....	53
C. Metode Pengumpulan Data .....	53
D. Populasi dan Sampel .....	54
E. Definisi Operasional Penelitian .....	55
F. Metode Analisis Data .....	57

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Hasil Penelitian .....	63
1. Sejarah Singkat Kabupaten Pringsewu .....	63
2. Geografi Kabupaten Pringsewu .....	65
3. Gambaran Hasil Penelitian .....	66
a. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pringsewu .....	66
b. Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan Kabupaten Pringsewu .....	67
c. Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan Kabupaten Pringsewu .....	79
d. Pengeluaran Pemerintah Sektor Infrastruktur Kabupaten Pringsewu .....	71
4. Analisis Data .....	72
a. Uji Asumsi Klasik .....	72
b. Uji Regresi Linear berganda .....	77
c. Uji Hipotesis .....	80
1) Uji Simultan (f) .....	80
2) Uji Parsial (t) .....	82
5. Koefesienn Determinasi .....	83

B. Pembahasan .....	84
1. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan, Kesehatan dan Infrastruktur Secara Parsial Terhadap Pertumbuhan Ekonomi tahun 2010-2017.....	84
a. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Pada Sektor Pendidikan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Pringsewu .....	88
b. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Pada Sektor Kesehatan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Pringsewu .....	91
c. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Pada Sektor Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Pringsewu .....	83
2. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan, Kesehatan dan Infrastruktur Secara Simultan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi tahun 2010-2017 .....	93
3. Analisis Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Pringsewu Tahun 2010-2017 Dalam Perspektif Ekonomi Islam .....	94

## **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	99
B. Saran .....	102

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**



## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Provinsi Lampung Tahun 2010-2017.....	7
Tabel 1.2	Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Pringsewu Tahun 2010-2017.....	9
Tabel 4.1	Pertumbuhan Ekonomi kabupaten Pringsewu Tahun 2010-2017 .....	67
Tabel 4.2	Realisasi Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan Kabupaten Pringsewu Tahun 2010-2017.....	68
Tabel 4.3	Realisasi Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan Kabupaten Pringsewu Tahun 2010-2017.....	70
Tabel 4.4	Realisasi Pengeluaran Pemerintah Sektor Infrastruktur Kabupaten Pringsewu Tahun 2010-2017.....	72
Tabel 4.5	Uji Normalitas .....	73
Tabel 4.6	Uji Multikolonieritas .....	74
Tabel 4.7	Uji Autokolerasi .....	75
Tabel 4.8	Hasil Regresi Linear Berganda.....	77
Tabel 4.9	Hasil Uji Simultan F.....	80
Tabel 4.10	Hasil Uji Parsial T.....	82
Tabel 4.11	Hasil Uji Koefisien Determinasi .....	84
Tabel 4.12	Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan dan Realisasi Belanja Langsung dan Tidak Langsung Kab. Pringsewu Tahun 2010-2017.....	86
Tabel 4.13	Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan dan Realisasi Belanja Langsung dan Tidak Langsung Kab. Pringsewu Tahun 2010-2017.....	90
Tabel 4.14	Pengeluaran Pemerintah Sektor Infrastruktur dan Realisasi Belanja Langsung dan Tidak Langsung Kab. Pringsewu Tahun 2010-2017.....	93

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Diagram Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Provinsi Lampung Tahun 2010-2017 .....	7
Gambar 2.1 Kerangka Berfikir.....	45
Gambar 4.1 Uji Heterokedastisitas .....	76



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal guna mendapatkan gambaran yang jelas dan memudahkan dalam memahami skripsi ini, maka perlu adanya uraian terhadap penegasan arti dan makna dari beberapa istilah yang terkait dengan tujuan skripsi ini. Dengan penegasan tersebut diharapkan tidak akan terjadi kesalahpahaman terhadap pemaknaan judul dari beberapa istilah yang digunakan, disamping itu langkah ini merupakan proses penekanan terhadap pokok permasalahan yang akan dibahas.

Adapun skripsi ini berjudul “**ANALISIS PENGELUARAN PEMERINTAH PADA SEKTOR PENDIDIKAN, SEKTOR KESEHATAN DAN SEKTOR INFRASTRUKTUR TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**” (Studi Kasus Kabupaten Pringsewu 2010-2017) untuk itu perlu diuraikan pengertian dari istilah-istilah judul tersebut sebagai berikut :

1. **Analisis** adalah kegiatan untuk memahami seluruh informasi yang terdapat pada suatu kasus, mengetahui isu yang terjadi, dan memutuskan apa yang harus segera dilakukan untuk memecahkan masalah.<sup>1</sup>
2. **Pengeluaran Pemerintah** adalah nilai pembelanjaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang digunakan untuk kepentingan masyarakat.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2012), h. 842



3. **Pendidikan** adalah pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan, atau penelitian.<sup>3</sup>
4. **Kesehatan** adalah upaya kesehatan dan faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal.<sup>4</sup>
5. **Infrastruktur** merupakan instrumen untuk memperlancar berputarnya roda perekonomian sehingga bisa mempercepat akselerasi pembangunan.<sup>5</sup>
6. **Pertumbuhan Ekonomi** adalah upaya peningkatan kapasitas produksi untuk mencapai penambahan output, yang diukur menggunakan Produk domestik Bruto (PDB) atau Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dalam suatu wilayah.<sup>6</sup>
7. **Ekonomi Islam** adalah tata aturan yang berkaitan tentang produksi, distribusi dan konsumsi, serta kegiatan lain dalam kerangka mencari maisyah (penghidupan individu maupun kelompok/negara sesuai ajaran islam) atau berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits<sup>7</sup>

Berdasarkan penjelasan dan penegasan bagian-bagian diatas, maka yang menjadi pembahasan dalam judul proposal ini adalah suatu penelitian

---

<sup>2</sup> Tommy Prio Haryanto, "Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007-2011" *Jurnal Unnes*, h.151

<sup>3</sup> Wikipedia Ensiklopedia Bebas (On-line), tersedia di: <https://id.wikipedia.org/wiki/pendidikan>, (06 juni 2019)

<sup>4</sup> Ade Fatma Lubis, *Ekonomi Kesehatan*, (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI, 2008), h. 6

<sup>5</sup> Faisal Basri, *Perekonomian Indonesia*, (Jakarta: Erlangga, 2002), h. 300

<sup>6</sup> Ahmad Ma'aruf dan Latri Wihastuti, "Pertumbuhan Ekonomi Indonesia: Determinan dan Prospeknya", *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan*, Vol.9, No.1, April 2008.h.44

<sup>7</sup> Hasan Andy, *Teori dan Aplikasi Ekonomi Pembangunan Perspektif Islam*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), h. 11

ilmiah yang bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah sektor pendidikan, kesehatan dan infratsruktur terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pringsewu tahun 2010-2017 dalam perspektif ekonomi islam.

## **B. Alasan memilih judul**

### **1. Alasan Objektif**

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi. Oleh sebab itu setiap negara maupun daerah senantiasa berusaha meningkatkan pertumbuhan ekonominya. Pertumbuhan ekonomi di kabupaten Pringsewu pada tahun 2017 merupakan kabupaten dengan pertumbuhan ekonomi terendah kedua di provinsi Lampung yakni sebesar 5,00.<sup>8</sup> Sedangkan pengeluaran pemerintah pada kabupaten Pringsewu mengalami kenaikan pada tiap tahunnya, dimana pada tahun 2017 pengeluaran pemerintah pada kabupaten Pringsewu mencapai 1.183.049.916.577. Dengan jumlah pengeluaran pemerintah yang semakin besar seharusnya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi yaitu dengan realisasi pengeluaran pemerintah dari berbagai sektor, seperti pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan, sektor kesehatan dan sektor infrastruktur. Dimana pendidikan dan kesehatan menjadi faktor penting dalam meningkatkan modal manusia

---

<sup>8</sup> BPS Provinsi Bandar Lampung, *"Tinjauan Ekonomi Regional Kabupaten Kota Provinsi Lampung 2017"*, (2 November 2018), h.10.

yang berkualitas. Sedangkan infrastruktur berperan penting dalam memperlancar arus perekonomian. Pengeluaran pemerintah yang telah dikeluarkan pada ketiga sektor tersebut diharapkan dapat membawa kemajuan pada bidang tersebut serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pemerintah sebagai pemenuh kebutuhan dasar masyarakat perlu mengelola pengeluaran pemerintah dengan baik guna meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat.

## 2. Alasan Subjektif

Memberikan pengetahuan kepada penulis dan pembaca tentang pengaruh pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan, sektor kesehatan dan sektor infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi, serta permasalahan yang diteliti dalam judul ini berkaitan dengan disiplin ilmu dalam jurusan ekonomi syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung.

## C. Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan ekonomi menjadi indikator untuk melihat hasil pembangunan yang telah dilakukan di suatu negara. Dimana salah satu tujuan suatu negara adalah meningkatkan pertumbuhan ekonominya. Pertumbuhan ekonomi merupakan kenaikan kapasitas jangka panjang dari negara yang bersangkutan untuk menyediakan berbagai barang ekonomi kepada penduduknya. Kenaikan kapasitas tersebut dimungkinkan oleh adanya



kamajuan atau penyesuaian-penyesuaian teknologi, intitusional dan ideologi terhadap berbagai keadaan yang ada.<sup>9</sup>

Pertumbuhan ekonomi dapat berguna sebagai penentu arah pembangunan dimasa yang akan datang dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi menjadi ukuran prestasi bagi tiap negara maupun daerah dalam keberhasilan pembangunan. Pemerintah sebagai stabilitator dalam perekonomian berkewajiban menjaga pertumbuhan ekonomi agar tetap stabil guna terciptanya kesejahteraan dimasyarakat.

Pertumbuhan ekonomi dalam ekonomi islam dapat diwujudkan jika tujuan sesuai dengan prinsip syariah yang berlandaskan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Berikut ini merupakan konsep pertumbuhan ekonomi dapat digambarkan dalam firman Allah sebagai berikut

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ ءَامَنُوا وَأَتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا  
فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ٩٦

Artinya: *“Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya”*. (Q.S Al-A'raf ayat 96)

Berdasarkan ayat diatas dapat dipahami bahwa kesejahteraan dan kebahagiaan hidup akan kita raih selama kita senantiasa mengingat Allah. serta mempercayai dan meyakini firman-firman-Nya, dan Allah SWT akan

---

<sup>9</sup>Michael Todaro, *Pembangunan Ekonomi Di dunia Ketiga*, (Jakarta, Erlangga, 2000).h.44

membukakan pintu-pintu rezeki dari segala penjuru langit dan bumi berupa hujan, tanaman, hewan ternak, rasa aman dan keselamatan dari segala macam bencana serta kesejahteraan lahir dan batin selama kita beriman dan bertaqwa.

Secara garis besar pertumbuhan ekonomi dalam islam bersifat multidimensi yang mencakup aspek kuantitatif dan kualitatif tujuannya bukan semata-mata kesejahteraan materi didunia tetapi juga kesejahteraan akhirat, yang keduanya saling menyatu satu sama lain.<sup>10</sup> Pandangan ekonomi islam menyatakan bahawa pertumbuhan bukanlah salah satu hal menjadi prioritas dalam pertumbuhan ekonomi, baik pertumbuhan dan pemerataan dibutuhkan secara simultan. Pada sisi lain, Islam juga tetap memandang pentingnya pemerataan distribusi kekayaan, karena pertumbuhan ekonomi dalam islam menggambarkan kesejahteraan secara menyeluruh.

Indikator yang digunakan untuk melihat pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah adalah tingkat pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Menurut badan pusat statistik PDRB merupakan jumlah nilai tambah bruto yang dihasilkan oleh seluruh unit kegiatan ekonomi yang berada di suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai dan barang jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi.<sup>11</sup> Dengan kata lain PDRB merupakan ukuran prestasi (keberhasilan) ekonomi dari seluruh kegiatan ekonomi disuatu daerah. pertumbuhan PDRB yang terus meningkat dari tahun ke tahun tentunya

---

<sup>10</sup>Rizal Mutaqin, "Pertumbuhan Ekonomi dalam Perspektif Islam Economic Growth in Islamic Perspective". *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol.1 No.2, 2 november 2018, h.120

<sup>11</sup>BPS Provinsi Lampung, "Tinjauan Ekonomi Regional Kabupaten Kota Provinsi Lampung 2017"...h.2

memerlukan sumber daya manusia yang memadai untuk menghasilkan output dalam jumlah yang besar.

Pertumbuhan ekonomi dicerminkan dari adanya perubahan PDRB dari tahun ke tahun, yang merupakan petunjuk apakah suatu daerah mengalami perkembangan pada pembangunan daerahnya. Perkembangan pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota provinsi Lampung dapat dilihat pada diagram pertumbuhan ekonomi berikut:

**Gambar 1.1**  
**Diagram Pertumbuhan Ekonomi Kab/Kota Provinsi Lampung**  
**Tahun 2010-2017**

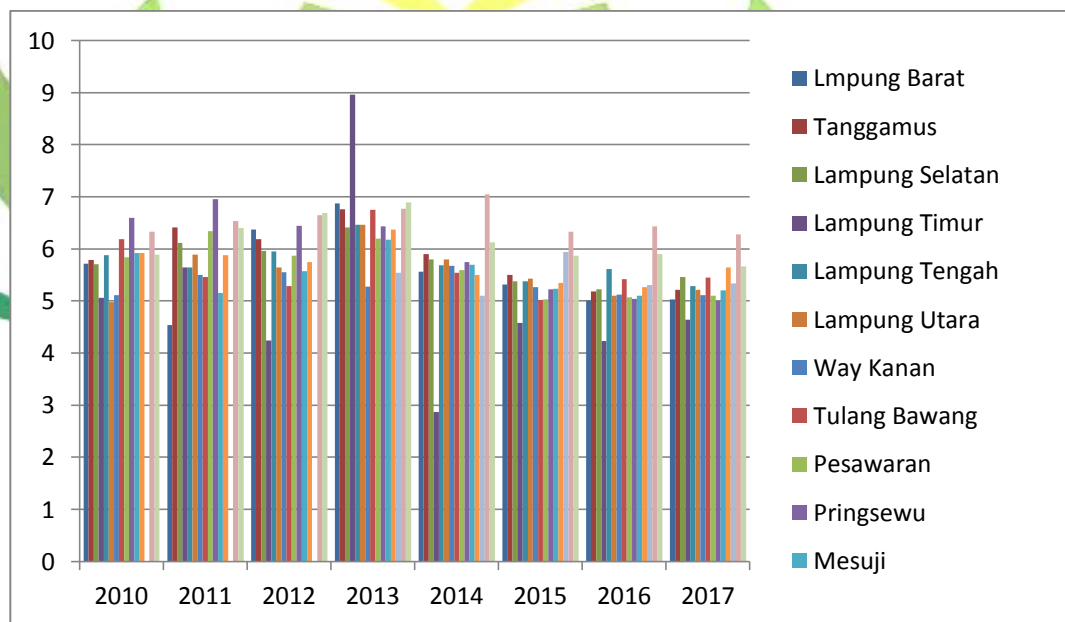


Diagram menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi pada tiap kabupaten/kota provinsi Lampung mengalami fluktuasi pada tiap tahunnya. Terlihat bahwa pada tahun 2010 sampai dengan 2013 hampir semua kabupaten mengalami kenaikan pada pertumbuhan ekonominya, sedangkan pada tahun 2014 sampai tahun 2016 rata-rata kabupaten/kota mengalami penurunan

pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi tertinggi pada tahun 2017 diperoleh oleh Bandar Lampung sebesar 6,28 persen, sedangkan kabupaten dengan pertumbuhan ekonomi terendah yakni kabupaten Lampung Timur mencapai 4,64 sedangkan Kabupaten Pringsewu pertumbuhan ekonominya merupakan kabupaten dengan pertumbuhan ekonomi terendah kedua yakni sebesar 5,00 persen pada tahun 2017.

Peran pemerintah sangat penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, terdapat dua kebijakan dilakukan pemerintah demi mencapai pembangunan ekonomi, yaitu kebijakan moneter yang berkaitan dengan jumlah uang beredar di masyarakat dan kebijakan fiskal yang merupakan kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah terhadap penerimaan dan pengeluaran untuk mencapai tujuan seperti pertumbuhan ekonomi dan stabilitas ekonomi. Pengeluaran pemerintah sendiri merupakan bagian dari kebijakan fiskal yaitu merupakan suatu tindakan mengatur jalannya perekonomian dengan cara menentukan besarnya penerimaan serta pengeluaran pemerintah pada tiap tahunnya yang tercermin dalam dokumen Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk nasional dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk daerah atau regional.

Penerapan kebijakan desentralisasi fiskal telah diterapkan oleh pemerintah sejak lama yaitu dengan ditetapkan UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, serta UU No. 33 Tahun 2004 tentang



perimbangan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.<sup>12</sup> Dengan diterapkannya otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, pemerintah daerah diberi wewenang oleh pemerintah pusat untuk mengatur dan melaksanakan urusan pemerintahan daerah dengan mengelola penerimaan dan pengeluaran daerah, dengan begitu setiap daerah diharapkan mampu membangun daerahnya sendiri serta memacu pertumbuhan ekonomi. Realisasi pengeluaran pemerintah kabupaten pringsewu dapat dilihat berdasarkan tabel berikut ini:

**Tabel 1.1**  
**Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Pringsewu**  
**Tahun 2010-2017 (dalam milyar)**

<b>Tahun</b>	<b>Belanja Langsung</b>	<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>Total Belanja</b>
2010	89.673.243.774	291.683.914.012	381.357.157.786
2011	191.753.143.693	385.339.119.205	577.092.262.898
2012	320.780.042.161	406.110.494.937	726.890.537.098
2013	284.878.789.807	487.448.368.141	772.327.157.948
2014	266.578.159.912	573.634.321.581	840.212.481.493
2015	404.776.736.387	597.516.493.447	1.002.293.229.834
2016	528.500.907.214	727.438.614.426	1.255.939.521.640
2017	494.817.648.711	688.232.267.866	1.183.049.916.577

Sumber: Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan (DJPk)

Pengeluaran pemerintah pada kabupaten Pringsewu terus mengalami kenaikan pada tiap tahunnya, akan tetapi total belanja pada tahun 2017 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya dimana totalnya sebesar 1.183.049.916.577 dikarenakan turunnya anggaran pada belanja langsung dan belanja tidak langsung. Pengeluaran pemerintah pada belanja tidak langsung cenderung lebih besar pada tiap tahunnya dibandingkan dengan belanja langsung.

---

<sup>12</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 dan 33 Tahun 2004, (On-line), Tersedia di: <http://www.dpr.go.id> (25 Agustus 2019).

Mengatur pengeluaran pemerintah semaksimal mungkin tentulah akan membawa dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi, salah satunya dengan memaksimalkan pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan. Dimana pendidikan merupakan salah satu cara meningkatkan kualitas modal manusia. Kabupaten Pringewu merupakan kabupaten yang termasuk dalam tiga pusat pendidikan yang berada di Provinsi Lampung yakni setelah Bandar Lampung dan Metro, berbagai pendidikan mulai dari pendidikan anak di usia dini, hingga perguruan tinggi semua tersedia di Pringewu. Sehingga tak berlebihan jika Pringewu disebut menjadi daerah rujukan pendidikan di provinsi Lampung. Hal ini dapat dilihat dengan semakin banyaknya perguruan tinggi di Kabupaten Pringewu yang pada tahun 2017.

Indikator pendidikan dapat diukur dengan rata-rata melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Pendidikan di kabupaten Pringewu dapat dilihat pada angka melek huruf sebesar 97,10 persen serta taraf pendidikan di kabupaten Pringewu, dengan rata-rata lama sekolah hanya 7,85 tahun, berarti secara rata-rata pendidikan formal yang di kecap penduduk Pringewu hanya sampai pada Sekolah Menengah Pertama/SMP.<sup>13</sup> Suryadi mengemukakan bahwa pendidikan formal diyakini akan mampu mengembangkan sumber daya manusia agar menjadi modal dasar dalam pembangunan yang berguna bagi pertumbuhan ekonomi. Mengatasi hal ini tentulah di perlukan perhatian khusus dari pemerintah dalam terciptanya sumberdaya manusia (SDM) yang berkualitas. Investasi pada fasilitas bidang pendidikan tentu akan membuat

---

<sup>13</sup> BPS Provinsi Lampung “*Tinjauan Ekonomi Regional Kabupaten Kota Provinsi Lampung 2017*”,...h.11.

suatu wilayah menjadi lebih produktif, karena akumulasi pengetahuan dan peningkatan keterampilan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Investasi dibidang pendidikan mempunyai makna yang sangat positif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara.<sup>14</sup> Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Hasti Aringga Suminar dkk, menyatakan bahwa Pendidikan berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Jember. Hal ini membuktikan bahwa fasilitas pendidikan yang lebih baik dalam setiap periodenya akan mampu meningkatkan sumber daya manusia dan mendorong perekonomian suatu daerah.<sup>15</sup>

Faktor lain yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah pengeluaran pemerintah pada sektor kesehatan. Kesejahteraan masyarakat dapat diwujudkan melalui kesehatan, kondisi kesehatan yang baik tentulah dapat memperpanjang angka harapan hidup. Di negara-negara yang tingkat kesehatannya lebih baik, setiap individu memiliki rata-rata hidup lebih lama, secara ekonomis mempunyai peluang untuk memperoleh pendapatan lebih tinggi.<sup>16</sup> Pada bidang kesehatan pemerintah kabupaten Pringsewu terus meningkatkan pelayanan kesehatan hingga ke pedesaan dengan telah tersedia fasilitas kesehatan berupa rumah sakit pada tahun 2017 yang berjumlah 8 unit. Indikator kesehatan dapat dilihat berdasarkan angka harapan hidup dimana angka harapan hidup kabupaten Pringsewu pada tahun 2017 mencapai 69,14

---

<sup>14</sup> Michael Todaro. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Jilid 1 & 2. (Jakarta: Erlangga, 2003).h.67

<sup>15</sup> Hasti Aringga Suminar dkk, "Pengaruh Pembangunan Infrastruktur Terhadap Pendapatan Regional Kabupaten Jember" (Artikel Ilmiah, Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, Universitas Jember, 2016)

<sup>16</sup>Michael Todaro, *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Jilid 1 & 2...h.4

tahun.<sup>17</sup> Semakin baiknya kesehatan akan dapat menciptakan sumber daya manusia (SDM) yang semakin baik pula. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh, Dedy Puja Wardana tentang pengaruh pembangunan ekonomi terhadap pembangunan manusia, menunjukkan bahwa anggaran pengeluaran pemerintah pada sektor kesehatan berpengaruh secara signifikan dengan memberikan kontribusi yang nyata dalam meningkatkan kualitas kesehatan untuk masyarakat Kalimantan Timur dengan adanya fasilitas yang memadai serta bantuan biaya pengobatan di rumah sakit melalui jaminan kesehatan yang diberikan pemerintah.<sup>18</sup> Dengan semakin baiknya kesehatan masyarakat Kalimantan Timur tentu akan meningkatkan angka harapan hidup serta produktivitas yang semakin baik pula.

Kabupaten Pringsewu mengalami perkembangan pembangunan pada setiap tahunnya. Pembangunan terus dilakukan guna menunjang perekonomian masyarakat, salah satunya yaitu perkembangan infrastruktur jalan yang merupakan akses dasar dalam sistem perekonomian. Dengan infrastruktur jalan yang semakin baik tentu mobilitas barang ataupun manusia menjadi lebih mudah. Kabupaten Pringsewu sendiri memiliki berbagai potensi khususnya pada bidang ekonomi. Letak Kabupaten Pringsewu yang strategis berada pada jalur barat yang merupakan salah satu jalur tersibuk di Provinsi Lampung menuju sejumlah provinsi di pantai barat Sumatra, membuat Kabupaten Pringsewu sangat potensial untuk pembangunan sektor perdagangan dan

---

<sup>17</sup> BPS Provinsi Lampung “*Provinsi Lampung Dalam Angka 2018*”, ...h.91.

<sup>18</sup> Dedy Puja Wardana, “Pengaruh Pembangunan Ekonomi Terhadap Pembangunan Manusia”, (Jurnal Ekonomi keuangan dan manajemen, Vol 12, (2), 2016), h.186



jasa.<sup>19</sup> Dengan semakin baiknya infrastruktur jalan tentulah akan dapat memperlancar arus distribusi hasil pertanian ke daerah-daerah lain, tentunya hal tersebut akan berdampak pada stabilnya harga-harga barang serta ongkos distribusi yang dapat ditekan. Peran pemerintah sangatlah dibutuhkan dalam penyediaan akses publik hal tersebut guna memperlancar sistem perekonomian dengan begitu akan tercipta pertumbuhan ekonomi yang semakin baik.

Infrastruktur jalan pada kabupaten pringsewu masih banyak mengalami kerusakan, dari seluruh jalan di kabupaten pringsewu total panjang jalan pada tahun 2017 mencapai 1.136,01 km dengan kondisi jalan rusak berat yang mencapai 646,48 km yang ditemui di setiap kecamatan.<sup>20</sup> Buruknya Infrastruktur disuatu daerah akan menyebabkan terjadinya hambatan bagi pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh, Windhu Putra tentang dampak pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi dan indeks pembangunan manusia, menunjukan bahwasannya pengeluaran pemerintah pada sektor infrastruktur berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi pada kabupaten perbatasan Kalimantan Barat, hal tersebut ditandai dengan meningkatnya aktivitas ekonomi di daerah perbatasan sebagai dampak dari perbaikan infrastruktur serta intensitas mobilitas orang dan juga barang semakin tinggi.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> Kabupaten Pringsewu Lampung “Potensi Kaabupaten Pringsewu”, (On-line), tersedia di: <https://kabupatenpring1000.blogspot.com>, (3 september 2019)

<sup>20</sup> Badan Pusat Statistik, “Kabupaten Pringsewu Dalam Angka 2018”,... h.108

<sup>21</sup> Windhu Putra, “Dampak Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia”, *jurnal Ekonomi, Bisnis dan Kewirausahaan*, Vol. 6. No. 2., 2017, h.133

Berdasarkan latar belakang diatas, penting untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dari pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan, kesehatan dan Infrastruktur di Kabupaten Pringsewu. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengangkat judul “**Analisis Pengeluaran Pemerintah Pada Sektor Pendidikan, Sektor Kesehatan dan Sektor Infrastuktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dalam Perspektif Ekonomi Islam**”

#### **D. Batasan Masalah**

Untuk memperjelas ruang lingkup masalah yang akan dibahas dan agar penelitian dilaksanakan secara fokus maka terdapat batasan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Penelitian ini dilakukan berkaitan dengan pengeluaran pemerintah. Dimana pengeluaran pemerintah sebagai variabel X (Independen). Pengeluaran Pemerintah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pada sektor pendidikan, sektor kesehatan dan sektor infrastruktur tahun 2010-2017.
2. Pertumbuhan ekonomi dalam penelitian ini adalah sebagai variabel Y (dependen), pengolahan sumber datanya menggunakan data dan informasi pertumbuhan ekonomi BPS Lampung tahun 2010-2017.

#### **E. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan, sektor kesehatan dan sektor infrastruktur secara Parsial terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten Pringsewu tahun 2010-2017.

2. Bagaimana pengaruh pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan, sektor kesehatan dan sektor infrastruktur secara simultan terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten Pringsewu tahun 2010-2017.
3. Bagaimana pertumbuhan ekonomi di kabupaten Pringsewu tahun 2010-2017 dalam perspektif ekonomi islam?

## **F. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berikut ini tujuan yang hendak dicapai pada penelitian ini, yaitu:

- a. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan, sektor kesehatan dan sektor infrastruktur secara Parsial terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten Pringsewu tahun 2010-2017.
- b. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan, sektor kesehatan dan sektor infrastruktur secara simultan terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten Pringsewu tahun 2010-2017.
- c. Untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dalam perspektif ekonomi islam.

### **2. Manfaat Penelitian**

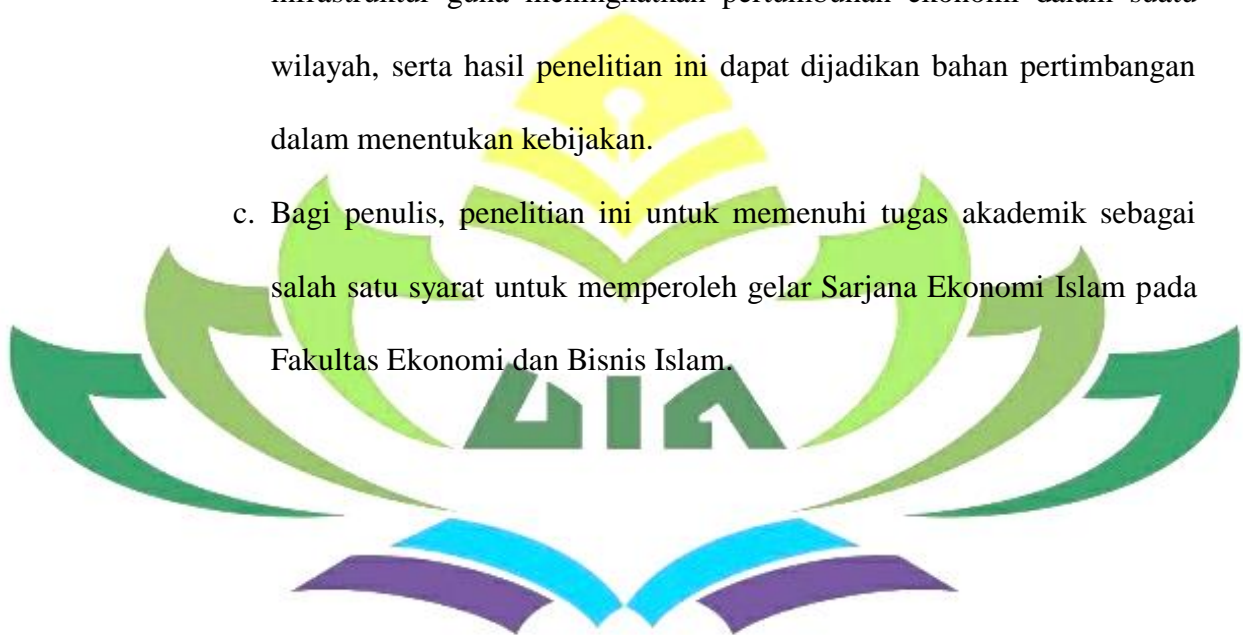
Adapun hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat dan kontribusi sebagai berikut:

- a. Bagi akademisi atau mahasiswa, penelitian ini nantinya dapat dijadikan bahan referensi ilmu pengetahuan ekonomi, khususnya tentang

pengaruh pengeluaran pemerintah pada pendidikan, kesehatan serta infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi yang dilakukan dengan menggunakan perspektif ekonomi islam atau tidak menggunakan perspektif ekonomi islam.

b. Bagi pemerintah, penelitian ini dapat dijadikan masukan agar lebih peduli terhadap pengeluaran sektor pendidikan, kesehatan dan infrastruktur guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam suatu wilayah, serta hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan.

c. Bagi penulis, penelitian ini untuk memenuhi tugas akademik sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Islam pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.





## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Pertumbuhan Ekonomi

##### 1. Pengertian Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan sebuah kondisi dimana terjadi peningkatan pada pendapatan karena produksi barang dan jasa yang semakin meningkat. Sadono Sukirno berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi adalah perubahan tingkat kegiatan ekonomi yang berlaku dari tahun ke tahun. Sehingga untuk mengetahuinya harus diadakan perbandingan pendapatan nasional dari tahun ke tahun, yang dikenal dengan laju pertumbuhan ekonomi.<sup>22</sup>

Menurut Todaro dan Smith, pertumbuhan ekonomi merupakan suatu proses peningkatan kapasitas produktif di dalam suatu perekonomian yang terjadi secara terus menerus dan berkesinambungan sehingga dapat menghasilkan tingkat pendapatan dan *Output* yang semakin meningkat pada tiap tahunnya.<sup>23</sup> Menurut Prasetyo, istilah pertumbuhan ekonomi (*economic growth*) secara paling sederhana dapat diartikan sebagai pertambahan output atau pertambahan pendapatan nasional agregat dalam kurun waktu tertentu misalkan satu tahun. Perekonomian suatu negara dikatakan mengalami

---

<sup>22</sup>Sadono Sukirno, *Makroekonomi: Teori Pengantar*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2013), h.9

<sup>23</sup>Tadaro dan Smith “*Pembangunan Ekonomi Edisi Kesembilan*”, (Jakarta: Erlangga, 2006), dikutip oleh Merlin Antasari, Ahmad Soleh “Pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Bengkulu”, *Jurnal Ekonomi Bisnis*, 2012, h.118

pertumbuhan jika jumlah balas jasa riil terhadap penggunaan faktor-faktor produksi pada tahun tertentu lebih besar daripada tahun-tahun sebelumnya.<sup>24</sup>

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwasannya pertumbuhan ekonomi merupakan proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk pendapatan nasional dalam selang waktu tertentu. Pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan pada suatu wilayah, dimana pertumbuhan ekonomi merupakan faktor penting dalam pembangunan. Tinggi rendahnya tingkat pertumbuhan ekonomi digunakan sebagai ukuran dari keberhasilan pembangunan negara ataupun wilayah.

Pengukuran pertumbuhan ekonomi dapat dilakukan dengan menghitung peningkatan perentase Produk Domestik Regional Bruto (PDB) untuk nasional dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) untuk daerah atau wilayah. Dari data PDRB tersebut dapat diketahui seberapa besar peran serta pencapaian masing-masing sektor ekonomi yang menyokong perekonomian suatu daerah.<sup>25</sup> PDRB sendiri merupakan jumlah keseluruhan nilai-nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan dari semua kegiatan perekonomian diseluruh wilayah pada periode tertentu. Rahardjo Adisasmita, berpendapat bahwa indikator yang dipergunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi adalah tingkat pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Alasan yang mendasari pemilihan PDRB sebagai suatu indikator mengukur pertumbuhan ekonomi adalah:

---

<sup>24</sup>Eko Prasetyo, *Fundamental Makro Ekonomi*, (Yogyakarta :Beta Offset, 2009), h.23

<sup>25</sup>Arsyad Lincolyn, *Ekonomi Pembangunan*, (Yogyakarta:BPFE,2010), h.54.

1. PDRB adalah jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh aktivitas produksi di dalam perekonomian daerah. Hal ini berarti peningkatan PDRB mencerminkan pula peningkatan balas jasa kepada faktor produksi yang digunakan dalam aktivitas produksi tersebut.
2. PDRB dihitung atas dasar konsep arus barang, artinya perhitungannya PDRB hanya mencakup nilai produk yang dihasilkan pada suatu periode tertentu. Aliran konsep ini memungkinkan kita untuk membandingkan jumlah output yang dihasilkan pada tahun ini dengan tahun sebelumnya.
3. Batas wilayah perhitungan PDRB adalah daerah (perekonomian domestik). Hal ini memungkinkan untuk mengukur sejauh mana kebijakan-kebijakan ekonomi yang diterapkan pemerintah mampu mendorong aktivitas perekonomian domestik.

## **2. Faktor-Faktor Pertumbuhan Ekonomi**

Menurut Tadaro dan Smith, terdapat tiga faktor dalam pertumbuhan ekonomi, yaitu:<sup>26</sup>

1. Akumulasi modal, yaitu semua investasi baru yang berupa tanah (lahan), peralatan fisik dan sumber daya manusia (*human resource*). Akumulasi modal dilakukan guna memperbesar output, investasi yang dilakukan ini berasal dari sebagian pendapatan yang kemudian ditabung dengan tujuan dapat menghasilkan output yang semakin besar. Investasi berupa investasi fisik seperti investasi pada infrastruktur yang berupa listrik, jembatan, jalan dll, yang akan menunjang aktivitas ekonomi. sedangkan Investasi

---

<sup>26</sup>Tadaro dan Smith, *Pembangunan Ekonomi di Dunia ketiga*, (Jakarta; Erlangga. 2003), h.92-98

dalam pembinaan sumber daya manusia (SDM) akan meningkatkan kualitas modal manusia yang akan membawa dampak yang menguntungkan terhadap produksi.

2. Pertumbuhan penduduk dan angkatan kerja. Pertumbuhan penduduk dalam hal-hal yang berhubungan dengan kenaikan jumlah angka kerja (*labor force*) secara tradisional telah dinggap sebagai faktor yang positif dalam merangsang pertumbuhan ekonomi. artinya, semakin banyak angkatan kerja maka akan menciptakan produktifitas tenaga kerja, sedangkan semakin banyaknya penduduk akan meningkatkan potensi dasar domestiknya.

3. Kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi disebabkan oleh teknologi cara-cara baru dan cara-cara lama yang diperbaiki dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan tradisional. Teknologi akan terus berkembang sesuai dengan kemajuan pada ilmu pengetahuan. Perkembangan teknologi akan berdampak pada ekonomi dan industri. dengan semakin baik teknologi tentu akan meningkatkan produktivitas karena kemudahan yang diberikan.

Menurut Samuelson dan Nordhaus ada empat faktor sebagai sumber pertumbuhan ekonomi, keempat faktor tersebut adalah:<sup>27</sup>

1. Sumber daya manusia (SDM)
2. Sumber daya alam (SDA)

---

<sup>27</sup>Heri Suparno, "Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan, Kesehatan dan Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Peningkatan Pembangunan Manusia Di Provinsi Kalimantan Timur" (Jurnal Ekonomika Bisnis Vol.5, No.1. Januari 2014), h.3



3. Pembentukan modal

4. Teknologi

### **3. Teori Pertumbuhan Ekonomi**

#### **a. Teori Klasik Adam Smith**

Teori klasik ini di pelopori oleh Adam Smith ditandai oleh dua faktor yang saling berkaitan yaitu pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan output total. Sedangkan pertumbuhan output total di pengaruhi oleh 3 komponen yaitu sumber daya alam, tenaga kerja, pertumbuhan penduduk serta jumlah persedian. Adam Smith berpendapat bahwasannya pertumbuhan penduduk akan mendorong pembangunan ekonomi. Penduduk yang bertambah akan memperluas pasar dan perluasan pasar akan meningkatkan spesialisasi dalam perekonomian. Sebagai akibat dari spesialisasi yang terjadi, maka tingkat kegiatan ekonomi akan bertambah tinggi. Perkembangan spesialisasi dan pembagian pekerjaan diantara tenaga kerja akan mempercepat proses pembangunan ekonomi karena spesialisasi akan meningkatkan peroduktivitas dan perkembangan teknologi.<sup>28</sup>

#### **b. Teori Human Capital**

Human capital atau investasi modal manusia berkaitan dengan pembentukan modal manusia yaitu proses memperoleh dan meningkatkan jumlah orang yang mempunyai keahlian, pendidikan dan pengalaman yang menentukan bagi pembangunan ekonomi suatu negara.

---

<sup>28</sup>Sadono Sukirno, *Edisis Kedua, Ekonomi pembangunan, pros, Masalah, dan dasar kebijakan*, (Jakarta:Kencana, 2006), h.244-245.

Dalam pengertian luas investasi pada modal manusia berarti pengeluaran di bidang pelayanan kesehatan, pendidikan dan sosial.<sup>29</sup>

Pendidikan memiliki daya dukung yang presentatif dalam atas pertumbuhan ekonomi. pendidikan sebagai alat untuk menciptakan tenaga kerja terdidik dan terlatih yang sangat dibutuhkan dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara. Pendidikan serta kesehatan dapat meningkatkan produktivitas kerja seseorang, yang akan meningkatkan pendapatannya. Pendapatan ini akan berpengaruh pula ke pendapatan nasional negara yang bersangkutan untuk kemudian akan meningkatkan pendapatan dan taraf hidup masyarakat.<sup>30</sup>

### c. Teori Harrod-Domar

Teori Harrod-domar pada hakikatnya berusaha untuk menunjukkan syarat yang diperlukan agar pertumbuhan yang mantap atau *steady growth* yang dapat didefinisikan sebagai pertumbuhan yang akan selalu menciptakan penggunaan sepenuhnya barang-barang modal akan selalu berlaku dalam perekonomian. Dalam Teori Harrod-domar pembentukan modal dipandang sebagai pengeluaran yang akan menambah kesanggupan suatu perekonomian untuk menghasilkan barang, maupun sebagai pengeluaran yang akan menambah permintaan efektif seluruh

---

<sup>29</sup> Nur Kodar, Analisis Human Capital Investment Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Jawa Tengah. (Fakultas Ekonomi dan bisnis Universitas Muhamadiyah Surakarta, Tahun 2014), h.5.

<sup>30</sup> Rika sadariawati, "Pengaruh Human Capital dan pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kesempatan Kerja di Sumatra Selatan" jurnaal ekonomi. 2017. h.4

masyarakat.<sup>31</sup> Apabila perkembangan ekonomi hendak dipertahankan dalam jangka panjang, maka pemerintah perlu memperbesar investasi.

Pengeluaran pemerintah berperan sebagai salah satu investasi yang diberikan untuk mendorong kenaikan pada pendapatan nasional. Peran swasta dalam investasi juga sangat diperlukan, untuk mendorong investasi pada pihak swasta pemerintah perlu mengelola infrastruktur baik, sebab infrastruktur yang baik akan mendorong pihak swasta untuk melakukan investasi.

#### **d. Teori Keynesian**

Menurut Keynes kegiatan perekonomian terutama tergantung kepada pengeluaran agregat yang dilakukan dalam perekonomian pada suatu waktu tertentu. Keynes menyatakan pentingnya pengeluaran agregat sebagai faktor utama penggerak perekonomian. Pengeluaran agregat merupakan pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan untuk membeli barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu perekonomian dalam suatu periode tertentu. Pengeluaran agregat yang terwujud tidak selalu mencapai full employment, untuk mengatasinya pemerintah perlu mempengaruhi pengeluaran agregat. Komponen utama pembelanjaan agregat ada 4 yaitu pengeluaran konsumsi rumah tangga, investasi oleh pihak swasta, pengeluaran pemerintah, dan ekspor neto.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup>*Ibid*, h.256-257

<sup>32</sup>*Ibid*, h.19

#### e. Teori Neoklasik Solow

Teori pada pertumbuhan Neo-klasik melihat dari sudut pandang yang berbeda yakni dari sudut pandang penawaran. Teori yang telah dikembangkan oleh Abramovits dan Solow, tergantung pada perkembangan faktor-faktor produksi (pertumbuhan modal, pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan teknologi). Teori solow mengemukakan bawasannya faktor penting dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi bukanlah pada pertumbuhan modal dan tenaga kerja, melainkan faktor paling penting dalam pertumbuhan ekonomi yakni kemajuan teknologi dan kemahiran serta kepakaran tenaga kerja.<sup>33</sup> Kemahiran dan kepakaran tenaga kerja tercipta dari SDM yang berkualitas, oleh sebab itu pemerintah pusat maupun daerah senantiasa harus menciptakan SDM yang semakin berkualitas.

#### 4. Pertumbuhan Ekonomi Dalam Perspektif Ekonomi Islam

Ekonomi islam memandang bahwa pertumbuhan ekonomi adalah bagian dari pembangunan ekonomi. pertumbuhan ekonomi dapat didefinisikan sebagai pertumbuhan secara terus-menerus dari faktor produksi secara benar yang mampu memberikan kontribusi bagi kesejahteraan manusia. Berdasarkan pengertian ini maka pertumbuhan ekonomi menurut islam merupakan hal yang sarat nilai. Suatu peningkatan yang dialami oleh faktor produksi tidak dianggap sebagai pertumbuhan

---

<sup>33</sup>Sadono Sukirno, *Makroekonomi : Teori Pengantar*, (Jakarta: PT. Raja grafindo Persada, 2013), h.437

ekonomi jika produksi tersebut misalnya memasukan barang-barang yang terbukti memberikan efek buruk dan membahayakan manusia.<sup>34</sup>

Menurut Abdullah Abdul Husein At-Tariqy, pertumbuhan ekonomi bukanlah sekedar aktivitas material saja. Lebih dari itu, pertumbuhan ekonomi merupakan aktivitas menyeluruh dalam bidang produksi yang terkait erat dengan keadilan distribusi. Pertumbuhan tidak hanya diukur dari aspek ekonomi, melainkan aktivitas manusia yang ditujukan untuk pertumbuhan dan kemajuan sisi material dan spiritual manusia sekaligus.<sup>35</sup> Sistem perekonomian dalam islam menganut pada jalan yang adil dan juga seimbang sehingga akaan tercipta pemerataan distribusi pada seluruh lapisan masyarakat. Pada dasarnya islam menganggap bahwa pertumbuhan ekonomi bukan hanya sekedar mencapai kesejahteraan material saja melainkan kesejahteraan akhirat juga, hal tersebut telah dijelaskan dalam Al-Qur'an sebagai berikut:

وَلِيَحْشَأَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ۙ

Artinya “Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar” (Q.S An-Nissa ayat 9)

---

<sup>34</sup>Lalu Muhammad Ismadi, “Prinsip Dasar Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi Islam”, (NTB, IAI Hamzanwadi Pancor Lotim, 2013), h.376

<sup>35</sup>Agustianto, *Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, (Artikel Islamic Economics, 2011) (On-line) tersedia di [www.Agustiantocenter.com/p=584](http://www.Agustiantocenter.com/p=584) (9 september 2019)



Pada ayat ini menjelaskan bahwasannya manusia tidak perlu khawatir akan kesejahteraannya karena Allah akan menjamin kesejahteraan kepada hamba-hambanya yang bertaqwa dan selalu bersikap baik dari segi perbuatan maupun perkataan. Sesungguhnya Allah itu maha pemurah dan maha pemberi rizki untuk itu dalam segala hal perbuatan hendaklah kita selalu mengingat Allah dan mengharapkan ridhonya.

Salah satu hal yang membedakan sistem ekonomi islam dengan sistem ekonomi lainnya adalah penggunaan parameter *falah*. *Falah* sendiri berasal dari bahasa Arab *Kerjafalaha-yuflihu* yang memiliki arti kesuksesan, kemuliaan atau kemenangan dalam hidup. *Falah* adalah kesejahteraan yang hakiki, kesejahteraan yang sebenar-benarnya dimana aspek rohaniah lebih ditekankan dari pada aspek material. Manusia yang beriman dan bertaqwa senantiasa memasrahkan segala hal kepada Allah termasuk kesejahteraan, akan tetapi tetap melakukan berbagai usaha salah satunya dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. karna pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu cerminan dari kesejahteraan. Terkadang kesejahteraan pada masyarakat hanya berpihak pada kaum kaya saja, kurangnya keadilan yang merata pada seluruh lapisan masyarakat karna sistem ekonomi islam yang masih dikesampingkan. Oleh sebab itu perlunya pemahaman agama yang dilakukan sejak dini, dimana penerapan komponen spiritual baik dalam kehidupan ataupun ekonomi lebih dikedepankan dari pada materil, demi terciptanya kesejahteraan secara merata.

Pertumbuhan ekonomi menurut ekonomi Islam, bukan sekedar terkait dengan peningkatan terhadap barang dan jasa, namun juga terkait dengan aspek moralitas dan kualitas akhlak serta keseimbangan antara tujuan duniawi dan ukhrawi. Menurut Ahmad, terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, yakni sebagai berikut:

1. Sumber daya yang dapat dikelola (*investible resources*)
2. Sumber daya manusia (*human resources*) dan wirausaha (*entrepreneurship*)
3. Teknologi (*technology*).

Menurut Thariq, terdapat beberapa karakteristik agar pertumbuhan ekonomi dapat tercapai, yaitu:<sup>36</sup>

1. Komprehensif (*al-Syumul*): Islam memandang bahwa pertumbuhan lebih dari sekedar persoalan materi dan memiliki tujuan yang lebih universal dibandingkan dengan orientasi terbatas yang ingin dicapai oleh sistem-sistem kontemporer, yaitu untuk menciptakan keadilan sosial. Pertumbuhan harus berorientasi pada tujuan dan nilai. Kebahagiaan yang ingin dicapai tidak hanya kebahagiaan dan kesejahteraan material di dunia, tetapi juga di akhirat.
2. Berimbang (*Tawazun*): Pertumbuhan tidak hanya diorientasikan untuk menciptakan pertambahan produksi, namun ditujukan berlandaskan asas keadilan distribusi. Pertumbuhan juga memerlukan adanya keberimbangan usaha-usaha pertumbuhan. Oleh karena itu, Islam tidak

---

<sup>36</sup>Rizzal Mutaqin, "Pertumbuhan Ekonomi Dalam Perspektif Ekonomi Islam", (jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis, Vol.1. No.2, November 2018), h.121-122.

menerima langkah kebijakan pertumbuhan perkotaan dengan mengabaikan pedesaan, industri yang mengabaikan pertanian atau dengan mengonsentrasikan percepatan pembangunan program tertentu dengan mengabaikan sarana umum dan prasarana pokok lainnya.

3. Realistis (*Waqi'iyah*): Realistis adalah suatu pandangan terhadap permasalahan sesuai dengan kenyataan. Dalam teori-teori sosial secara umum, realistis merupakan persyaratan yang harus ada di dalamnya, karena teori yang utopis yang jauh dari kondisi riil akan sulit diterima oleh masyarakat. Islam yang merupakan agama yang berasal dari Allah tidak mungkin menetapkan aturan-aturan idealis yang jauh dari kehidupan manusia dan kemungkinan penerapannya. Realistis Islam adalah idealitas, dan idealitas islam adalah realitas.

4. Keadilan (*'Adalah*); pertumbuhan harus disertai dengan adanya keadilan distributif dari realitas yang ada kita bisa melihat betapa kesenjangan antara yang kaya dan miskin di negeri ini telah sedemikian hebatnya. Realita disparitas ekonomi ini tidak saja terjadi di Indonesia dan negara-negara berkembang lainnya, tetapi juga negara-negara maju yang menjadi pendekar kapitalisme. Maka disinilah pentingnya pertumbuhan yang disertai dengan pemerataan yang adil.

5. Bertanggung Jawab (*Mas'uliyah*): Ketika Islam memberikan ruang kebebasan terhadap individu dalam bidang apapun dengan ekspresi yang mencerminkan penghormatan kepada manusia untuk menikmati kenikmatan duniawi, maka kebebasan ini tidak diberikan secara absolut

tanpa batas. Kebebasan itu dibatasi oleh berbagai aturan yang menunjukkan adanya jaminan kebahagiaan seluruh anggota masyarakat. Karakteristik ini juga berkaitan dengan aspek lain dalam pertumbuhan, yaitu bahwa pertumbuhan harus *sustainable*(berkelanjutan) salah satunya dengan tidak melakukan eksploitasi pada SDA.

6. Mencukupi (*Kifayah*): Islam tidak hanya menetapkan adanya karakteristik tanggung jawab seperti yang telah diungkapkan, namun tanggung jawab itu haruslah mutlak dan mampu menakup realisasi kecukupan bagi umat manusia. Dalam hal ini para ahli fikih telah menetapkan dalam bidang pengalokasian harta dengan ukuran yang dapat mencukupi kebutuhan berupa pangan, sandang dan papan dalam batas yang seharusnya.

7. Berfokus pada manusia (*Ghayatuha al-Insan*): Islam sangat memperhatikan masalah pembangunan ekonomi, namun tetap menempatkannya pada persoalan pembangunan yang lebih besar, yaitu pembangunan umat manusia. Fungsi utama Islam adalah membimbing manusia pada jalur yang benar dan arah yang tepat. Semua aspek yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi harus menyatu dengan pembangunan ummat manusia secara keseluruhan.

## **B. Pengeluaran Pemerintah**

### **1. Pengertian Pengeluaran Pemerintah**

Pengeluaran pemerintah adalah pembelanjaan barang-barang modal, barang konsumsi dan jasa-jasa. Pengeluaran pemerintah merupakan

penggunaan uang dan sumber daya suatu Negara untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan Negara atau pemerintah guna mewujudkan fungsinya dalam menciptakan kesejahteraan.<sup>37</sup> Dalam buku Marzuki Ilyas, pengeluaran pemerintah menyangkut seluruh pengeluaran untuk membiayai kegiatan-kegiatannya, pengeluaran tersebut bertujuan agar tercapai kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.<sup>38</sup> Dapat disimpulkan bahwasannya pengeluaran pemerintah merupakan anggaran yang digunakan pemerintah dalam membiayai berbagai kegiatan dan pengeluaran lainnya guna menciptakan kesejahteraan kepada masyarakat secara keseluruhan. Peran pemerintah sangatlah penting untuk mengatur jalannya perekonomian agar tercipta stabilitas pada sistem perekonomian. Secara umum peranan dan fungsi pemerintah dalam perekonomian dapat di klasifikasikan menjadi tiga kelompok, yaitu:<sup>39</sup>

1. Fungsi Alokasi, yaitu mengalokasikan sumber daya yang digunakan dalam memproduksi barang yang berasal dari barang swasta atau barang publik. Barang swasta merupakan barang yang ketersediaannya dapat dipenuhi oleh sistem pasar. Barang publik merupakan barang yang tidak dapat disediakan oleh pihak swasta seperti prasarana jalan,

---

<sup>37</sup>Basuki Pujoalwanto, *Perekonomian Indonesia, Tinjauan Historis, Teoritis dan Empiris*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), h.174

<sup>38</sup> Marzuki Ilyas, *Ilmu Keuangan Negara (Public Finance)*, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1989), h.38 Dikutip Merlin Anggraeni "Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Di Sektor Pendidikan, kesehatan dan Pertanian Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Periode 1970-2015" (Skripsi, Universitas Negeri Yogyakarta: 2017), h.26

<sup>39</sup>Guritno Mangkoesubroto, *Ekonomi Publik* (Yogyakarta: BPFE, 2002) h.2



pertahanan dan sebagainya yang pengadaannya disediakan oleh pemerintah.

2. Fungsi Distribusi, yaitu peran pemerintah dalam melakukan distribusi sumber daya bagi masyarakat. Pendistribusian pendapatan atau kekayaan yang dilakukan pemerintah dilakukan guna mensejahterakan rakyatnya. Melalui subsidi pemerintah dapat memengaruhi distribusi pendapatan secara tidak langsung, yakni melalui kebijakan anggaran seperti subsidi pupuk untuk petani, atau subsidi BBM, serta subsidi listrik.

3. Fungsi Stabilisasi, peran pemerintah yang paling utama yaitu sebagai stabilisator perekonomian. Pemerintah dapat menstabilkan keadaan ekonomi agar hal-hal yang tidak diinginkan dapat dicegah sehingga tercipta perekonomian yang kondusif dimana inflasi akan terkendali, sistem keamanan akan terjamin, serta tingkat pertumbuhan ekonomi yang memadai.

John Maynard Keynes mengatakan bahwa untuk menjamin kebutuhan yang stabil pemerintah perlu menerapkan kebijakan fiskal (perpajakan dan belanja pemerintah), kebijakan moneter (tingkat suku bunga dan uang beredar), dan pengawasan langsung.<sup>40</sup> Pengeluaran pemerintah merupakan bagian dari kebijakan fiskal, dimana pada kebijakan fiskal ekonomi suatu negara diarahkan melalui pengeluaran dan pendapatan (berupa pajak) pemerintah. Kebijakan fiskal pemerintah dapat

---

<sup>40</sup>Robinson Tarigan, *Ekonomi Regional Teori dan Aplikasi*, (Jakarta; PT Bumi Aksara 2005), h.49

mempengaruhi tingkat pendapatan nasional, mempengaruhi kesempatan kerja, dapat mempengaruhi tinggi rendahnya investasi nasional dan dapat mempengaruhi distribusi pendapatan nasional.<sup>41</sup>

Pengeluaran pemerintah di Indonesia selain menjadi sumber pembiayaan bagi program-program sosial, juga berperan besar dalam meningkatkan dan mempertahankan pengeluaran agregat serta pertumbuhan ekonomi. sumber dana yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah tersebut berasal dari penerimaan dalam negeri dan hibah. Sedangkan pengeluaran pemerintah daerah dibiayai oleh pendapatan daerah khususnya pendapatan asli daerah dan dana perimbangan dan pemerintah pusat. Menurut jenis kegiatan berdasarkan Pemendagri No. 13 tahun 2006 Pasal 50, pengeluaran pemerintah daerah dikelompokkan menjadi dua, yaitu:<sup>42</sup>

#### 1. Belanja Langsung

Belanja langsung adalah kegiatan belanja daerah yang dianggarkan dan berhubungan secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah. Jenis belanja langsung terdiri dari;

- a. Belanja pegawai, digunakan untuk pengeluaran honorarium/upah dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah
- b. Belanja barang dan jasa, digunakan untuk pengeluaran dalam bentuk pembelian/ pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12

---

<sup>41</sup>Wikipedia, kebijakan fiskal, (On-line), tersedia di <https://id.wikipedia.org/wiki/kebijakanfiskal>. (28 agustus 2019)

<sup>42</sup> Ma'ruf, Mohammad, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, (Jakarta: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia)

bulan dan pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah.

- c. Belanja Modal, digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti [tanah](#), [mesin](#), [bangunan](#), [jalan](#), [irigasi](#) dan [aset tetap](#) lainnya.

## 2. Belanja Tidak Langsung

kegiatan belanja daerah yang dianggarkan dan tidak memiliki hubungan apapun secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. keberadaan belanja tidak langsung bukan merupakan konsekuensi dari ada tidaknya suatu program atau kegiatan. Belanja jenis ini, pada umumnya dibagi menjadi beberapa jenis yaitu:

- a. Belanja pegawai, belanja pegawai tidak langsung merupakan belanja kompensasi yang diberikan dalam bentuk [gaji](#) dan [tunjangan](#), serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Belanja [bunga](#), Belanja bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang, sesuai dengan perjanjian pinjaman berjangka yang terdiri dari jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang

- c. Belanja [subsidi](#), digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada perusahaan atau lembaga tertentu agar harga jual produksi dan jasa yang dihasilkan, dapat terjangkau oleh masyarakat luas.
- d. Belanja [hibah](#), digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan jasa kepada pemerintah maupun pemerintah daerah lainnya, dan kelompok masyarakat serta perorangan yang secara spesifik telah memiliki peruntukan yang jelas
- e. Bantuan sosial, digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan barang kepada masyarakat, dengan tujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- f. Belanja bagi hasil, digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota atau pendapatan kabupaten/kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- g. Bantuan keuangan, digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari provinsi kepada kabupaten/kota, pemerintah desa, dan kepada pemerintah daerah lainnya atau dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa dan pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan atau peningkatan kemampuan keuangan daerah

h. Belanja tidak terduga, Belanja tidak terduga merupakan tindakan belanja untuk kegiatan yang bersifat tidak biasa atau tidak diharapkan akan terjadi seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun sebelumnya, yang telah ditutup.

Pengeluaran pemerintah pada daerah pringsewu telah dimaksimalkan guna menciptakan pertumbuhan ekonomi sebaik mungkin, hal tersebut terlihat dari pengeluaran pemerintah yang terus mengalami peningkatan pada tiap tahunnya, akan tetapi untuk meningkatkan kemajuan ekonomi dengan hanya mengandalkan pengeluaran sektor publik tidaklah cukup, perlunya memperbesar peran aktif sektor swasta dalam menyediakan barang-barang publik tentunya akan berdampak baik bagi perekonomian daerah.

## **2. Teori Pengeluaran Pemerintah**

### **d. Teori Rostow dan Musgrave**

Menurut teori yang dikembangkan oleh Rostow dan Musgrave yang menghubungkan perkembangan pengeluaran pemerintah dengan tahapan-tahapan pembangunan ekonomi yaitu tahap awal, tahap menengah dan tahap lanjut. Pada tahap awal perkembangan ekonomi, persentase investasi pemerintah terhadap total investasi besar sebab pada tahap ini pemerintah harus menyediakan prasarana, seperti misalnya pendidikan, kesehatan prasarana transportasi dan sebagainya.



Pada tahap menengah pembangunan ekonomi investasi pemerintah tetaplah dibutuhkan, namun pada tahap ini peranan investasi swasta sudah semakin membesar. Peranan pemerintah tetap besar pada tahap menengah, oleh karena peranan swasta yang semakin besar ini banyak menimbulkan kegagalan pasar dan juga menyebabkan pemerintah harus menyediakan barang dan jasa publik dalam jumlah yang lebih banyak dan kualitas yang lebih baik.

Pada tahap lanjut, Rostow berpendapat bahwa pembangunan terjadi peralihan aktivitas pemerintah dari penyediaan prasarana ekonomi ke pengeluaran untuk layanan sosial seperti program kesejahteraan hari tua, program pendidikan, program pelayanan kesehatan masyarakat, infrastruktur dan sebagainya.<sup>43</sup>

Teori Rostow dan Musgrave merupakan suatu pandangan yang muncul dari pengamatan berdasarkan pembangunan ekonomi yang dialami banyak negara, tetapi tidak didasarkan oleh teori tertentu selain itu tidak jelas apakah tahapan pertumbuhan ekonomi terjadi dalam tahap demi tahap, ataupun beberapa tahap dapat terjadi secara simultan.

#### **e. Teori Peacock and Wisman**

Peacock and Wisman mengemukakan sebuah teori mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah. Teori ini dikenal dengan *The Displacement Effect* dimana teori ini didasarkan pada suatu pandangan bahwa pemerintah sengaja memperbesar pengeluaran, sedangkan

---

<sup>43</sup>Sadono Sukirno, *Ekonomi Pembangunan Proses, Masalah, dan Dasar Kebijakan*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2006), h.169.

masyarakat tidak suka membayar pajak yang semakin besar untuk membiayai pengeluaran pemerintah yang semakin besar tersebut.

Teori ini didasarkan bahwa masyarakat mempunyai tingkat toleransi pajak, diaman masyarakat dapat memahami besarnya pungutan pajak yang dibutuhkan oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran pemerintah.

### **3. Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan**

Pendidikan merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh setiap manusia, baik itu pendidikan formal atau informal. Pendidikan merupakan kebutuhan mutlak yang wajib disediakan oleh pemerintah. Alokasi anggaran pengeluaran pemerintah pada pendidikan merupakan wujud dari investasi pemerintah guna meningkatkan kualitas pada sumber daya manusia. Besarnya pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan tercermin dari realisasi anggaran yang dikeluarkan, yakni sebesar 20 persen pada tiap tahunnya. Dengan adanya pendidikan masyarakat akan memperoleh ilmu pengetahuan, kecakapan dan juga keterampilan. Dimana hal tersebut merupakan faktor dasar yang kita butuhkan untuk dapat bersaing dengan negara maju.

Buruknya pendidikan yang ada dinegara berkembang akan menciptakan sumber daya manusia yang kurang berkualitas, hal tersebut mengakibatkan susahnya untuk negara berkembang bersaing dengan negara maju. Asumsi yang digunakan dalam teori *human capital* adalah bahwa pendidikan formal merupakan faktor yang dominan untuk menghasilkan

masyarakat berproduktivitas tinggi. Teori human capital dapat diaplikasikan dengan syarat adanya sumber teknologi tinggi secara efisien dan adanya sumber daya manusia yang dapat memanfaatkan teknologi yang ada. Teori ini percaya bahwa investasi dalam hal pendidikan sebagai investasi dalam meningkatkan produktivitas masyarakat.<sup>44</sup>

Investasi dalam hal pendidikan mutlak dibutuhkan maka pemerintah harus dapat membangun suatu sarana dan sistem pendidikan yang baik. Alokasi anggaran pengeluaran pemerintah terhadap pendidikan merupakan wujud nyata dari investasi untuk meningkatkan produktivitas masyarakat. Pengeluaran pembangunan pada sektor pendidikan dapat dialokasikan untuk penyediaan infrastruktur pendidikan dan pelayanan pendidikan kepada seluruh masyarakat.

Menurut Setiawan implikasi dari pembangunan dalam pendidikan adalah kehidupan manusia akan semakin berkualitas. Dalam kaitannya dengan perekonomian secara umum semakin tinggi kualitas kehidupan suatu bangsa, semakin tinggi tingkat pertumbuhan dan kesejahteraan bangsa tersebut. Semakin tinggi kualitas hidup atau investasi sumber daya manusia yang kualitas tinggi akan berimplikasi juga terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi nasional.<sup>45</sup>

#### **4. Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan**

---

<sup>44</sup>Bambang Rizki Saputra. "Analisis Penaruh Pengeluaran daerah Atas infrastruktur, pendidikan Kesehatan dan Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi", (Skripsi Fakultas Ekonomi, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2016), h.27

<sup>45</sup>Abdi Setiawan, "Analisis Pengaruh Domestik dan Ekspor Terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia tahun 1981-2005", *jurnal ekonomi*, yogyakarta, 2006, h.12

Kesehatan merupakan kebutuhan mutlak bagi setiap manusia, semakin baiknya kesehatan maka akan meningkatkan produktivitas yang tinggi. Kegiatan ekonomi suatu negara akan berjalan apabila ada jaminan kesehatan bagi setiap penduduknya. Terkait dengan teori *human capital* bahwa modal manusia berperan signifikan, bahkan lebih penting dari faktor teknologi dalam memacu pertumbuhan ekonomi.<sup>46</sup>

Kesehatan merupakan prasyarat bagi peningkatan produktivitas, sementara keberhasilan pendidikan bertumpu pada kesehatan yang baik. Oleh karena itu, kesehatan dapat dilihat sebagai komponen pertumbuhan dan pembangunan yang vital sebagai input fungsi produksi agregat. Pengeluaran pemerintah pada sektor kesehatan merupakan salah satu cara pemerintah meningkatkan kesehatan masyarakat. Dengan anggaran pengeluaran pemerintah, pemerintah dapat menyediakan layanan publik baik berupa sarana dan prasarana kesehatan.

Perbaikan layanan kesehatan masyarakat merupakan bentuk investasi pada sumber daya manusia untuk dapat menciptakan masyarakat yang sejahtera. Oleh sebab itu kesehatan haruslah menjadi perhatian utama bagi pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik. Anggaran pengeluaran pemerintah pada sektor kesehatan hendaklah mampu menjamin hak kesehatan masyarakat dengan melakukan pelayanan kesehatan yang merata, memadai, bermutu serta terjangkau bagi kalangan masyarakat. Dengan terpenuhinya kesehatan pada seluruh lapisan masyarakat tentu akan

---

<sup>46</sup>*Ibid*, h.13

menciptakan peluang bagi masyarakat untuk lebih produktif serta dapat meningkatkan pendaptannya.

## 5. Pengeluaran Pemerintah Atas Infrastruktur

Menurut Kodoatie infratraktur merupakan fasilitas-failitas fisik yang dikembangkan atau dibutuhkan oleh agen-agen publik untuk fungsi-fungsi pemerintahan dalam penyediaan air, tenaga listrik, pembuangan limbah, transportasi dan pelayanan-pelayanan lainnya untuk memfasilitasi tujuan ekonomi dan sosial. beberapa yang cukup dominan diantaranya adalah perumahan dan transportasi. Dimana hal ini menjadikan Infrastruktur sebagai faktor penting bagi terciptaya pembangunan di suatu wilayah,

Infrastrukur merupakan roda penggerak suatu perekonomian Semakin baiknya infrastruktur disuatu negara maka akan mempermudah kegiatan-kegiatan ekonomi, adanya infrastruktur tentunya akan memperluas akses pasar dan mengurangi biaya transaksi. Diharapkan pula dengan membaiknya infrastruktur akan memperlancar mobilitas ekonomi antar daerah yang selanjutnya menarik minat para investor untuk berinvestasi. Pada akhirnya hal tersebut dapat meningkatkan pembangunan yang kemudian dapat meningkatkan kesejahteraan kepada masyarakat.

Menurut Friawan, terdapat tigaa alasan utama mengapa infrastruktur penting dalam integrasi ekonomi, yaitu;<sup>47</sup>

1. Ketersediaan infratraktur yang baru merupakan mesin utama pembangunan ekonomi

---

<sup>47</sup> Deni Friawan 2008 Kondisi Pembangunan infrastruktur di Indonesia . CSIS Vol.37 No. 2 juni 2008. Jakarta lembaga penerbit fakultas ekonomi Universitas Indonesia.



2. Memperoleh manfaat yang penuh dari integrasi, ketersediaan jaringan infrastruktur sangat penting dalam memperlancar aktivitas perdagangan dan investasi
3. Perhatian terhadap perbaikan infrastruktur penting untuk mengatasi kesenjangan ekonomi antar daerah

### C. Tinjauan Pustaka

Kajian pustaka atau penelitian terdahulu merupakan hal yang dapat dijadikan sebagai acuan atau perbandingan yang dapat memberikan gambaran tentang hasil dari penelitian terdahulu menyangkut pertumbuhan ekonomi. sebab untuk melakukan sebuah penelitian perlunya hasil dari penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai referensi. Berikut ini beberapa penjelasan dari hasil penelitian yang berkaitan dengan rencana penelitian:

Penelitian tentang pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi pernah dilakukan sebelumnya oleh beberapa peneliti, salah satunya adalah penelitian yang dilakukan oleh Citra Ayu Basica Effendy Lubis dengan judul penelitian “Pengaruh Jumlah Tenaga Kerja, Tingkat pendidikan pekerjaan dan Pengeluaran Pendidikan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi” Penelitian ini bertujuan Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif. Data yang digunakan merupakan data sekunder dari 33 provinsi di Indonesia periode tahun 2006-2012. Data diolah menggunakan analisis data panel dengan model regresi fixed effect. Hasil penelitian dengan taraf signifikansi 5% menunjukkan bahwa variabel jumlah tenaga kerja, tingkat pendidikan pekerja dan pengeluaran pemerintah untuk pendidikan memiliki pengaruh yang positif

dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia periode 2006-2012.<sup>48</sup> Perbedaan pada penelitian ini terletak pada Variabel independen (bebas) yang digunakan, dimana pengeluaran pemerintah pada penelitian ini hanya membahas pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan saja sedangkan penulis membahas pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan, kesehatan dan infrastruktur dan uji data yang digunakan adalah regresi linear berganda.

Pada tahun 2017 Windhu Putra, melakukan penelitian dengan judul “Dampak Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia di Perbatasan Indonesia”, tujuan pada penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah pada infrastruktur, pendidikan dan kesehatan terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang berada di sepanjang perbatasan selama periode 2007 hingga 2014. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data panel. Menerapkan model estimasi Ordinary Least Square (OLS), penelitian ini menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah untuk infrastruktur dan pendidikan menciptakan pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi sementara pengeluaran untuk pelayanan kesehatan tidak secara signifikan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.<sup>49</sup> Perbedaan penelitian ini terletak pada uji yang digunakan dimana penulis menggunakan uji Regresi Linear Berganda.

---

<sup>48</sup>Citra Ayu Basica Effendy Lubis, “Pengaruh Jumlah Tenaga Kerja, Tingkat pendidikan pekerjaan dan Pengeluaran Pendidikan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi” (*jurnal Economia*, Vol 10, No. 2, Oktober 2014), h.187

<sup>49</sup>Windhu Putra, “Dampak Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia”, (*Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Kewirausahaan*, Vol. 6. No. 2, 2017), h.120

Pada tahun 2016, Hasti Aringga Suminar, Anifatul Hanim, Fajar Wahyu Prianto. Melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Pembangunan Infrastruktur Terhadap Pendapatan Regional Kabupaten Jember” Dengan tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh pembangunan fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, serta fasilitas jalan terhadap pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini menggunakan metode Ordinary Least Square (OLS) dengan hasil menunjukkan bahwa pembangunan fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, serta fasilitas jalan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, serta fasilitas jalan masing-masing mampu meningkatkan perekonomian masyarakat. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan terletak pada metode yang digunakan dimana penulis menggunakan metode uji regresi linear berganda.<sup>50</sup>

Penelitian selanjutnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Heri Suparno, dengan judul “Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan, Kesehatan dan Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Peningkatan Pembangunan Manusia Di Provinsi Kalimantan Timur”. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif dengan metode analisis data menggunakan analisis jalur berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan, dimana penulis menggunakan analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh langsung antara pengeluaran pemerintah sektor pendidikan, kesehatan dan infrastruktur terhadap indeks pembangunan

---

<sup>50</sup>Hasti Aringga Suminar, Anifatul Hanim, Fajar Wahyu Prianto, “Pengaruh Pembangunan Infrastruktur Terhadap Pendapatan Regional Kabupaten Jember, (Jurnal *Ekonomi*, Universitas Jember, 2016), h.1

manusia dan pertumbuhan ekonomi. Terdapat pengaruh tidak langsung antara pengeluaran pemerintah sektor pendidikan, kesehatan dan infrastruktur terhadap indeks pembangunan manusia melalui pertumbuhan ekonomi.<sup>51</sup> Perbedaan lain pada penelitian ini terletak pada variabel dependen dimana pada penelitian ini membahas dua variabel dependen yaitu indeks pembangunan manusia (IPM) dan pertumbuhan ekonomi.

Tahun 2016, Sigit Wibowo melakukan penelitian dengan judul “Analisis Pengaruh Sektor Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Nilai IPM dan Pertumbuhan Ekonomi Studi di Provinsi Jawa Tengah”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh belanja sektor pendidikan, sektor kesehatan dan laju pertumbuhan ekonomi terhadap indeks pembangunan manusia (IPM) di provinsi Jawa Tengah serta nilai indeks pembangunan manusia (IPM) terhadap pertumbuhan ekonomi di provinsi Jawa Tengah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa belanja sektor pendidikan, sektor kesehatan dan laju pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh nyata terhadap perubahan indeks pembangunan manusia (IPM). Hasil yang sama juga untuk pengaruh belanja sektor pendidikan, sektor kesehatan dan perubahan nilai IPM jug tidak berpengaruh nyata terhadap perubahan laju pertumbuhan ekonomi di provinsi Jawa Tengah dengan periode waktu 2013 sampai dengan 2015.<sup>52</sup> Perbedaan pada penelitian ini terletak pada variabel independen dimana peneliti hanya

---

<sup>51</sup>Heri Suparno, “Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan, Kesehatan dan Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Peningkatan Pembangunan Manusia Di Provinsi kalimantan Timur”...h.1

<sup>52</sup>Sigit Wibowo, “Analisis Pengaruh Sektor Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Nilai IPM dan Pertumbuhan Ekonomi Studi di Provinsi Jawa Tengah” (*Tesis Universitas Terbuka Jakarta*, 2016).h.iv.

menggunakan variabel kesehatan dan pendidikan saja, dan terdapat dua variabel dependen yaitu IPM dan pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan model *analisis Two Stage Least Squares*, sedangkan penulis menggunakan analisis regresi linear berganda.

#### **D. Kerangka Pemikiran**

Kerangka pemikiran merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Kerangka pemikiran yang baik akan menjelaskan secara teoritis pertautan antara variabel yang diteliti. Kerangka pemikiran dapat berupa bagan, deskriptif kualitatif atau bahkan keduanya.

Kerangka berfikir pada penelitian ini difokuskan pada analisis pengaruh pengeluaran pemerintah daerah pada sektor pendidikan, sektor kesehatan dan sektor infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi. Semakin baiknya infrastruktur akan menarik pihak swasta untuk berinvestasi pada daerah tersebut dan jika hal tersebut diimbangi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia tentu akan meningkatkan efisiensi produksi. Aspek-aspek perbaikan sumber daya manusia dapat dilakukan melalui pembangunan di sektor pendidikan dan sektor kesehatan, dimana pendidikan dan kesehatan merupakan hal dasar yang harus dipenuhi.

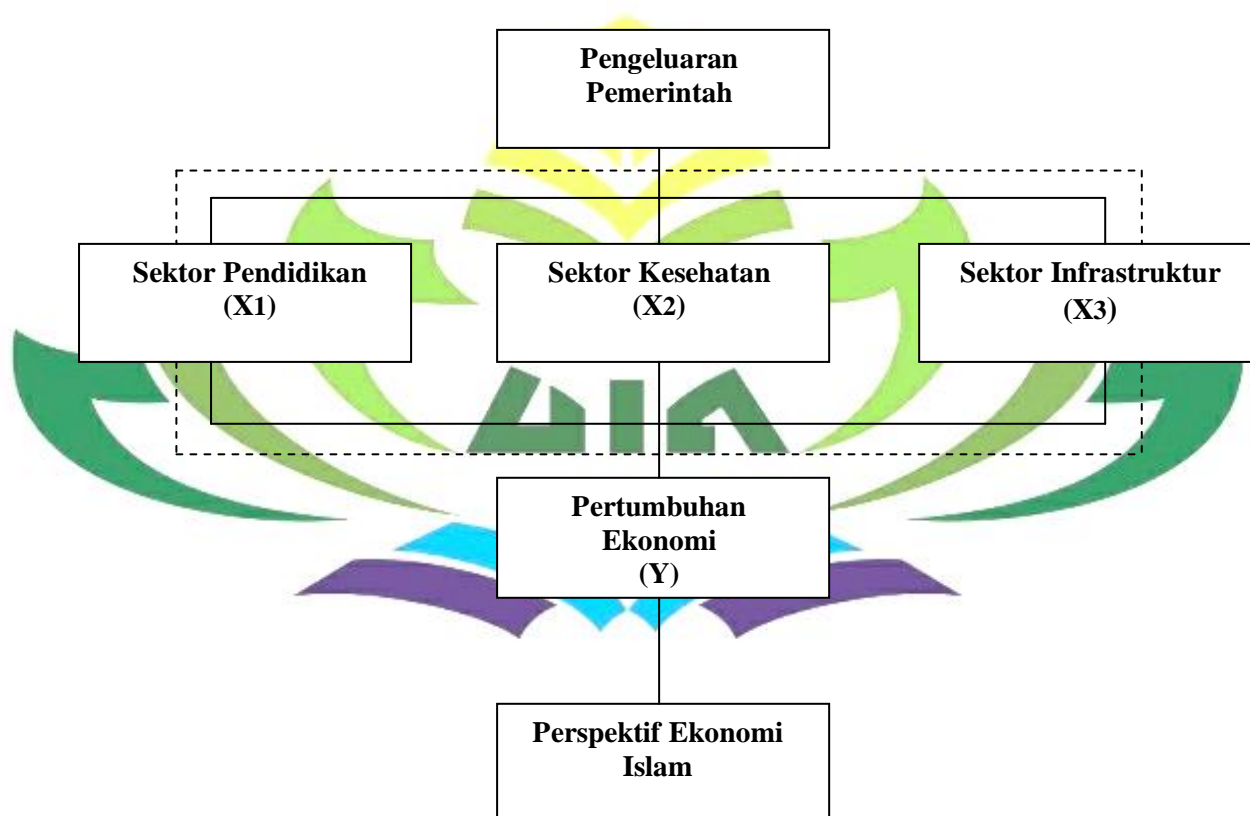
Pemerintah memiliki kewajiban untuk memenuhi hal dasar tersebut baik berupa sarana dan prasarana. Pembangunan sektor-sektor tersebut dapat direalisasikan melalui pengeluaran pemerintah daerah. Ketiga sektor tersebut akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia kemudian meningkatkan



efisiensi produksi sehingga berpengaruh terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi.

Untuk memudahkan penelitian yang dilakukan serta untuk memperjelas alur pemikiran kerangka teori yang akan dikaji dalam perspektif ekonomi islam maka peneliti menentukan kerangka berfikir sebagai berikut:

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Pemikiran**



#### **E. Hipotesis**

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan

data.<sup>53</sup> Hipotesis dapat di artikan pula sebagai pernyataan sementara yang diajukan untuk memecahkan suatu masalah, atau untuk menerangkan suatu gejala. Berikut hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini:

### **1. Pengaruh pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi.**

Pendidikan merupakan suatu bentuk investasi sumber daya manusia (SDM) yang dapat memberi keuntungan dimasa medatang, baik pada masyarakat atau negara, maupun bagi orang-orang yang mengikuti pendidikan itu sendiri. Pendidikan sendiri merupakan kebutuhan mutlak manusia yang harus dipenuhi. Pendidikan menjadi cerminan bagi kemajuan dan kesejahteraan suatu negara, dengan semakin baik pendidikan di suatu negara maka akan semakin baik pula kualitas sumber daya manusia (SDM) baik dari segi spirtual, intelegensi dan juga skill. Teori klasik Adam Smith menjelaskan penyebab kesejahteraan suatu negara dengan dua faktor yaitu pentingnya skala ekonomi dan pembentukan keahlian serta kualitas manusia. Dengan SDM yang berkualitas tentunya akan menciptakan produktivitas yang lebih tinggi sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan teori dan penelitian yang didukung oleh hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Merlin anggraeni dengan judul “Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah di Sektor Pendidikan, Kesehatan dan Pertanian Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Periode 1970-2015”

---

<sup>53</sup>Sugiono, *Metodologi Penelitian: Pendekatan Kulaitatif, Kuantitatif, R&D*. cetakan ke 23, (Bandung: Alfabeta, 2016),h.96

dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah sektor pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Pengetahuan dan keterampilan teknologi merupakan peralatan immaterial dimana tanpa keduanya modal fisik manusia tidak dimanfaatkan secara produktif. Semakin besar pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan akan meningkatkan modal manusia yang nantinya akan meningkatkan produktifitas sehingga PDB Indonesia juga meningkat. Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu maka hipotesis yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

**Ha:** Pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

**Ho:** Pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

## **2. Pengaruh pengeluaran pemerintah pada sektor kesehatan terhadap pertumbuhan ekonomi.**

Kesehatan merupakan keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Pengeluaran pemerintah pada sektor kesehatan merupakan salah satu upaya yang harus dipenuhi pemerintah untuk memenuhi layanan kesehatan bagi masyarakat. Kegiatan ekonomi akan berjalan apabila terdapat jaminan kesehatan bagi setiap masyarakat. Terkait dengan teori human capital bahwa modal manusia berperan signifikan, bahkan lebih

penting dari faktor teknologi dalam memacu pertumbuhan ekonomi.<sup>54</sup> sebab manusia merupakan penggerak perekonomian, dengan semakin baik kualitas SDM maka akan menciptakan perekonomian yang semakin baik pula.

Berdasarkan teori dan penelitian yang didukung oleh hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ilyas, Abdul Hamid Paddu, Sultan Suhab dengan judul “Pengaruh Pengeluaran pemerintah sektor Pendidikan dan Sektor Kesehatan Terhadap IPM dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sinjai” hasil penelitian menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah pada sektor kesehatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, Investasi Pemerintah di sektor kesehatan akan memberikan kesempatan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang lebih merata kepada masyarakat sehingga sumber daya manusia yang handal dan sehat akan semakin bertambah. Meningkatnya taraf kesehatan akan mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia, meningkatkan produktivitas tenaga kerja yang pada akhirnya akan menciptakan perbaikan ekonomi masyarakat. Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu maka hipotesis yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

**Ha:** Pengeluaran pemerintah pada sektor kesehatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

**Ho:** Pengeluaran pemerintah pada sektor kesehatan tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

---

<sup>54</sup>Heri suparno, “Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan, Kesehatan dan Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Peningkatan Pembangunan Manusia Di Provinsi kalimantan Timur”...h.5

### **3. Pengaruh pengeluaran pemerintah pada sektor infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi.**

infrastruktur merupakan sistem fisik yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dalam lingkup sosial dan ekonomi. Infrastruktur dapat menunjukkan seberapa besar pemerataan pembangunan pada suatu negara atau wilayah. Dengan semakin baiknya infrastruktur pada suatu daerah tentulah akan memperlancar perdagangan maupun perekonomian, hal tersebut yang akan mendorong para pemodal untuk berinvestasi. Dengan adanya peningkatan pada pengeluaran pemerintah sektor infrastruktur diharapkan dapat memberikan perhatian pada peningkatan investasi publik sehingga kebutuhan infrastruktur dapat terpenuhi sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi.<sup>55</sup>

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh oleh Hasti Aringga Suminar, Anifatul Hanim, Fajar Wahyu Prianto dengan judul “Pengaruh Pembangunan Infrastruktur Terhadap Pendapatan Regional Kabupaten Jember” dengan hasil pembangunan infrastruktur memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, Hal ini membuktikan bahwa infrastruktur yang ditingkatkan dalam setiap periodenya akan memberikan pengaruh terhadap peningkatan akses dan penggunaan jalan serta mendorong perekonomian suatu daerah. Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu maka hipotesis yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

---

<sup>55</sup>*Ibid*, h.6



**Ha:** Pengeluaran pemerintah pada sektor infrastruktur berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

**Ho:** Pengeluaran pemerintah pada sektor infratraktur tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

#### **4. Pengaruh pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan, sektor kesehatan dan sektor infrastruktur secara simultan terhadap pertumbuhan ekonomi**

Pertumbuhan ekonomi sangat bergantung pada pengeluaran agregat. Dimana salah satu komponen penting dalam agregat adalah pengeluaran pemerintah. Pengeluaran pemerintah yang dikeluarkan pada sektor pendidikan sektor kesehatan dan sektor infrastruktur akan menciptakan SDM yang berkualitas serta mendorong pemodal untuk berinvestasi sebab semakin baiknya infrastruktur. Hal tersebut tentulah akan mendorong peningkatan pada pertumbuhan ekonomi. berdasarkan penelitian dapat dilihat hubungan antara variabel independen (bebas) terhadap variabel dependen (terikat). Berdasarkan teori Keynesian bahwa untuk menerobok hambatan perekonomian ini dengan campur tangan publik dan pemerintah. Ia berpendapat bahwa pemerintah harus campur tangan dalam peningkatan belanja mayarakat, hal terebut dapat terealisasikan melalui pengeluaran pemerintah.

Berdasarkan teori dan penelitian yang didukung oleh hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Heri Suparno, maka hipotesis yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

**Ha:** Pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan, sektor kesehatan dan sektor infrastruktur berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

**Ho:** Pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan, sektor kesehatan dan sektor infrastruktur tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.



## DAFTAR PUSTAKA

Abdi Setiawan, Analisis Pengaruh Domestik dan Ekspor Terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia tahun 1981-2005, *jurnal ekonomi*, yogyakarta, 2006.

Agustianto, *Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, (Artikel Islamic Economics, 2011), (On-line) tersedia di [www.Agustiantocenter.com/p=584](http://www.Agustiantocenter.com/p=584) (9 september 2019)

Ahmad Ma'aruf dan Latri Wihastuti, Pertumbuhan Ekonomi Indonesia: Determinan dan Prospeknya, *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan*, Vol.9, No.1, April 2008.

Andy, Hasan. *Teori dan Aplikasi Ekonomi Pembangunan Perspektif Islam*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian; suatu pendekatan praktek*, Cetakan XIV Jakarta: Renika Cipta, 2010.

Bambang Rizki Saputra. Analisis Penaruh Pengeluaran daerah Atas infrastruktur, pendidikan Kesehatan dan Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Skripsi Fakultas Ekonomi, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2016.

Basri, Faisal. *Perekonomian Indonesia*, Jakarta: Erlangga, 2002.

Bastian, Indra. *Akutansi Sektor Publik Suatu Pengantar*, Jakarta: Erlangga, 2006.

BPS Kabupaten Pringsewu, "*Kabupaten Pringsewu Dalam Angka 2018*"

BPS Provinsi Lampung, "*Statistik Daerah Provinsi Lampung 2018*"

BPS Provinsi Lampung, "*Tinjauan Ekonomi Regional Kabupaten Kota Provinsi Lampung 2017*"

Citra Ayu Basica Effendy Lubis , Pengaruh Jumlah Tenaga Kerja, Tingkat pendidikan pekerjaan dan Pengeluaran Pendidikan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, *jurnal Economia*, Vol 10, No. 2, Oktober 2014.

Dedy Puja wardana, Pengaruh Pembangunan Ekonomi Terhadap Pembangunan Manusia, *Jurnal Ekonomi keuangan dan manajemen*, Vol 12, (2), 2016.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2012.

Dwi Priyatno, *Buku Saku Analisis Statistisik Data SPSS*, Jakarta: MediaKom, 2011.

Hadi, Sutrisno. *Metode Reseach* , Yogyakarta: ANDI, 2002.

Hasti Aringga Suminar, Anifatul Hanim, Fajar Wahyu Prianto, Pengaruh Pembangunan Infrastruktur Terhadap Pendapatan Regional Kabupaten Jember, *Jurnal Ekonomi*, Universitas Jember, 2016.

Heri Suparno, *Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan, Kesehatan dan Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Peningkatan Pembangunan Manusia Di Provinsi kalimantan Timur*, *Jurnal Ekonomika Bisnis* Vol.5, No.1. Januari 2014.

Kabupaten Pringsewu Lampung “Potensi Kaabupaten Pringsewu”, (On-line), tersedia di: <https://kabupatenpring1000.blogspot.com>, (3 september 2019)

Lalu Muhammad Ismadi, *Prinsip Dasar Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi Islam*, NTB, IAI Hamzanwadi Pancor Lotim, 2013.

Lincolyn, Arsyad. *Ekonomi Pembangunan*, Yogyakarta: BPFE, 2010.

Lubis, Ade Fatma. *Ekonomi Kesehatan*, Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI, 2008.

Mangoesubroto, Guritno. *Ekonomi Publik* Yogyakarta: BPFE, 2002.

Merlin Antasari, Ahmad Soleh “Pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Bengkulu”, *Jurnal Ekonomi Bisnis*, 2012.

Merlin Anggraeni “Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Di Sektor Pendidikan, kesehatan dan Pertanian Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Periode 1970-2015” .Skripsi, Universitas Negeri Yogyakarta: 2017.

Noor, Juliansah. *Metodelogi Penelitian: skripsi, tesis, desertasi dan karya ilmiah* Jakarta: Kencana, 2011.

Prasetyo, Eko. *Fundamental Makro Ekonomi*, Yogyakarta :Beta Offset, 2009.

Pujoalwanto, Basuki. *Perekonomian Indonesia, Tinjauan Historis, Teoritis dan Empiris*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014.

Rizal Mutaqin, *Pertumbuhan Ekonomi dalam Perspektif Islam Economic Growth in Islamic Perspective. Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol.1 No.2, 2 november 2018.

Sigit Wibowo, “Analisis Pengaruh Sektor Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Nilai IPM dan Pertumbuhan Ekonomi Studi di Provinsi Jawa Tengah” *Tesis Universitas Terbuka Jakarta*, 2016.

Sugiono, *Metodologi Penelitian: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, R&D*. cetakan ke 23, Bandung: Alfabeta, 2016.

Sukirno, Sadono. *Edisi Kedua, Ekonomi pembangunan, pros, Masalah, dan dasar kebijakan*, Jakarta: Kencana, 2006.

Sukirno, Sadono. *Makroekonomi : Teori Pengantar*, Jakarta: PT. Raja grafindo Persada, 2013.

Tadaro dan Smith, *Pembangunan Ekonomi di Dunia ketiga*, Jakarta: Erlangga. 2003.

Tarigan, Robinson. *Ekonomi Regional Teori dan Aplikasi*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005.

Todaro, Michael. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Jilid 1 & 2. Jakarta: Erlangga, 2003.

Tommy Prio Haryanto. “Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007-2011 ” , *Jurnal Unnes*.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 dan 33 Tahun 2004, (On-line), Tersedia di: <http://www.dpr.go.id> (25 Agustus 2019).

Wikipedia Ensiklopedia Bebas (On-line), tersedia di: <https://id.wikipedia.org/wiki/pendidikan>, (06 juni 2019)

Wikipedia, kebijakan fiskal, (On-line), tersedia di <https://id.wikipedia.org/wiki/kebijakanfiskal>. (28 agustus 2019)

Windhu Putra, Dampak Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia, *jurnal Ekonomi, Bisnis dan Kewirausahaan*, Vol. 6. No. 2, 2017.